

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



**INTEGRASI EKONOMI HIJAU DAN KURIKULUM PENDIDIKAN
GUNA MENDORONG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

OLEH :

NAMA: DR. IIN KANDEDES, M.A.

NIP. 197912022011012006

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) LXVI
LEMHANNAS RI
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb., salam sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat, rahmat dan hidayah-Nyalah maka penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVI telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia dalam bentuk sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul: **“INTEGRASI EKONOMI HIJAU DAN KURIKULUM PENDIDIKAN GUNA MENDORONG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN “**.

Penentuan Tutor dan judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2024 tanggal 28 Maret 2024 tentang Penetapan Judul Taskap Peserta PPRA LXVI tahun 2024 Lemhannas Republik Indonesia, dengan perintah kepada para peserta PPRA LXVI untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Plt. Gubernur Lemhannas RI Bapak Letjen TNI Eko Margiyono yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXVI di Lemhannas RI tahun 2024. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap Bapak Dr. H. Dadang Solihin, SE, M.A. dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini.

Besar harapan kami agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Semoga Allah Subhanahu Wata'ala senantiasa memberikan bimbingan, rahmat dan kasih sayang-Nya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan. Sekian dan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Jakarta, 19 Agustus 2024

Dr. Iin Kandedes, M.A
Peserta PPRA LXVI
NIP. 197912022011012006



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Iin Kandedes, M.A.

Pangkat : -

Jabatan : Sekjen Dewan Pengurus Pusat Pengajian Al-Hidayah

Instansi : Kongres Wanita Indonesia (KOWANI)

Alamat : Vila Cipedak Asri, Jl. Nurul Ihsan I, No, 56H, Cipedak, Jagakarsa,
Jakarta Selatan

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LXVI tahun 2024 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia untuk dibatalkan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, 19 Agustus 2024
Penulis,



Dr. Iin Kandedes, M.A.

NIP. 197912022011012006

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	8
3. Maksud dan Tujuan.....	8
4. Ruang Lingkup dan Sistematika.....	8
5. Metode dan Pendekatan.....	9
6. Pengertian.....	12
BAB II LANDASAN PEMIKIRAN.....	14
7. Umum.....	14
8. Peraturan Perundangan-Undangan.....	15
9. Data dan Fakta.....	21
10. Kerangka Teoritis.....	27
11. Lingkungan Strategis.....	33
BAB III PEMBAHASAN.....	42
12. Umum.....	42
13. Analisa SWOT Pada Integrasi Ekonomi Hijau dan Kuruikulum Pendidikan Guna Mendorong Pembangunan Berkelanjutan	51
14. Analisa PESTLE Pada Integrasi Ekonomi Hijau dan Kuruikulum Pendidikan Guna Mendorong Pembangunan Berkelanjutan	69

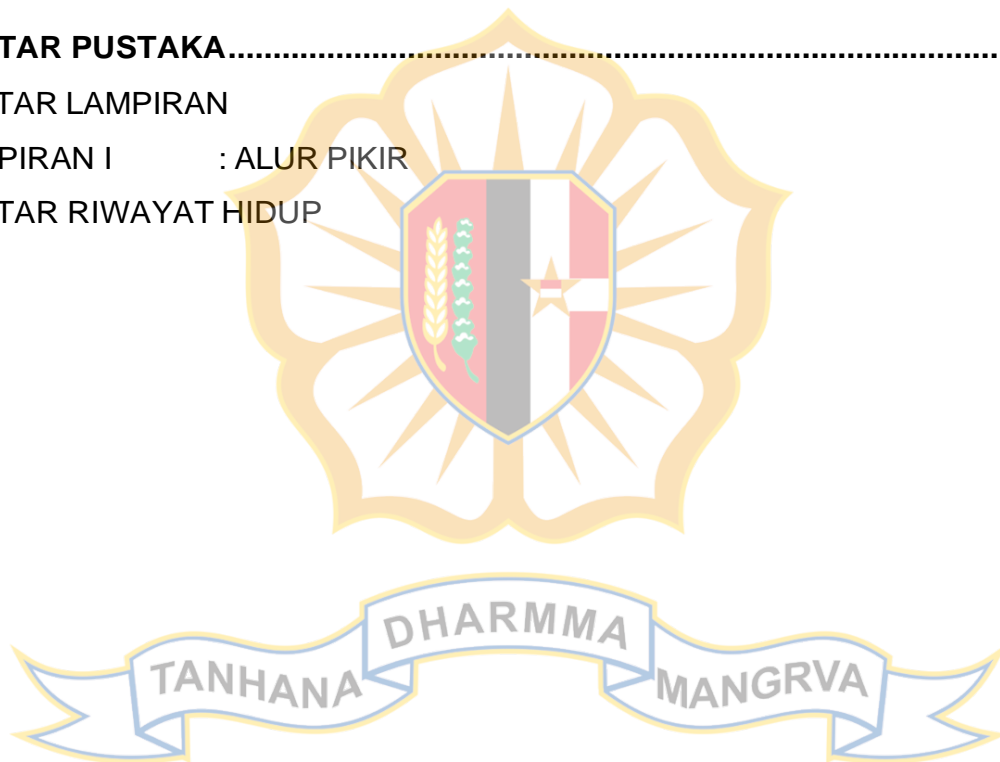
15.	Analisa Dynamic Governance pada Integrasi Ekonomi Hijau dan Kurikulum Pendidikan guna Mendorong Pembangunan Berkelanjutan.....	72
16.	Pelaksanaan Materi Kuliah tentang Ekonomi Hijau pada Kurikulum Pendidikan di Perguruan Tinggi Saat Ini.....	75
17.	Kurikulum Pendidikan dapat Mendorong Pembangunan yang Berkelanjutan.....	82
18.	Strategi Integrasi Ekonomi Hijau dan Kurikulum Pendidikan guna Mendorong Pembangunan Berkelanjutan.....	91
BAB IV	PENUTUP.....	94
19.	Kesimpulan	94
20.	Rekomendasi.....	95

DAFTAR PUSTAKA.....	97
----------------------------	-----------

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I : ALUR PIKIR

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

TABEL 1	MATRIKS DOKUMENTASI REGULASI
TABEL 2	MATRIKS SWOT VARIABEL STRENGTH (KEKUATAN)
TABEL 3	MATRIKS SWOT VARIABEL WEAKNESSES (KELEMAHAN)
TABEL 4	MATRIKS SWOT VARIABEL OPPORTUNITIES (PELUANG)
TABEL 5	MATRIKS SWOT VARIABEL THREATS (ANCAMAN)
TABEL 6	MATRIKS STRATEGI S-O
TABEL 7	MATRIKS STRATEGI TERPILIH S-O
TABEL 8	MATRIKS STRATEGI S-T
TABEL 9	MATRIKS STRATEGI TERPILIH S-T
TABEL10	MATRIKS STRATEGI W-O
TABEL 11	MATRIKS STRATEGI TERPILIH W-O
TABEL 12	MATRIKS STRATEGI W-T
TABEL 13	MATRIKS STRATEGI TERPILIH VARIABEL W-T



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1	3 KOMPONEN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
GAMBAR 2	ANALISA SWOT
GAMBAR 3	IDENTIFIKASI FAKTOR INTERNAL
GAMBAR 4	IDENTIFIKASI FAKTOR EKSTERNA
GAMBAR 5	MATRIKS SWOT PERUMUSAN STRATEGI
GAMBAR 6	KOMPONEN ANALISA PESTLE
GAMBAR 7	KERANGKA PEMIKIRAN DYMIC GOVERNANCE
GAMBAR 8	JUMLAH PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA TAHUN 2012-2022



INTEGRASI EKONOMI HIJAU DAN KURIKULUM PENDIDIKAN GUNA MENDORONG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

1. 1. Konsep dan pengertian ekonomi hijau

Konsep ekonomi hijau atau *green economy* telah menjadi isu utama dalam dinamika ekonomi global dan perekonomian lokal diseluruh negara di dunia. Berbeda dengan model pembangunan konvensional yang mengandalkan praktik yang tidak berkelanjutan, sebaliknya gagasan ekonomi hijau mengedepankan keberlangsungan baik di bidang ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Sejak pertama dicetuskan tahun 2008 pada program lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Environment Programme* (UNEP)), konsep ekonomi hijau oleh berbagai negara termasuk Indonesia telah dianggap sebagai solusi dari sistem ekonomi yang cenderung eksploitatif dan banyak menimbulkan kerusakan lingkungan.

Konsep ekonomi hijau telah dirumuskan sebagai bentuk yang lebih rinci dari konsep pembangunan berkelanjutan. Ekonomi hijau adalah suatu model pembangunan dengan mensinergikan antara pertumbuhan ekonomi dan upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. UNEP (*United Nations Environment Programme*) menyatakan bahwa ekonomi hijau yaitu ekonomi yang minim karbon, pengelolaan dari sumber daya yang dilaksanakan secara efisien, dan inklusif secara sosial. Tujuan utama dari ekonomi hijau adalah mencapai sistem pertumbuhan ekonomi yang berjalan secara seimbang antara memelihara ekosistem dan pengurangan dampak negatif bagi lingkungan sekitar¹.

Ekonomi hijau diharapkan dapat mendukung pembangunan berkelanjutan dan menciptakan peluang peningkatan kesejahteraan sosial. Contoh praktik ekonomi hijau antara lain adalah penggunaan energi terbarukan, pengelolaan sampah yang baik, penghematan air, dan pengurangan emisi gas rumah kaca.

¹ <https://www.unep.org/explore-topics/green-economy>, UNEP.2011

Hasil evaluasi *Forest Ecosystem Valuation Study* (studi penilaian tentang ekosistem hutan) menyatakan jika pelaksanaan ekonomi hijau berkontribusi memberi manfaat lebih banyak terhadap suatu negara dibanding dengan suatu bisnis atau usaha yang berjalan secara reguler. Ekonomi hijau adalah suatu cara pandang terhadap ekonomi baru yang memperhatikan pemeliharaan lingkungan dan berusaha untuk merealisasikan pembangunan berkelanjutan. Indonesia adalah negara yang memiliki wilayah hutan yang begitu luas dan memberikan pengaruh signifikan terhadap iklim dunia, sehingga perlu dibuat berbagai regulasi dan peraturan perundang-undangan yang bertujuan memelihara ekosistem hutan tersebut.

Tantangan-tantangan dalam penerapan ekonomi hijau, secara geopolitik memberikan pengaruh kepada Indonesia dalam mewujudkan komitmen global dalam penyelesaian masalah iklim global dan isu pembangunan berkelanjutan. Jika ditinjau dari sudut pandang kajian Geopolitik, maka penerapan ekonomi hijau di Indonesia dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor geopolitik, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Secara geopolitik Indonesia memiliki potensi besar untuk menerapkan ekonomi hijau, karena memiliki kekayaan alam yang luar biasa, seperti: hutan, lahan, laut, dan energi terbarukan. Namun, Indonesia juga menghadapi tantangan besar, seperti deforestasi, degradasi lingkungan, emisi gas rumah kaca, dan ketimpangan sosial serta rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya gerakan ekonomi hijau.

Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan strategi dan kebijakan yang dapat memanfaatkan sumber daya alam secara optimal, efisien, dan adil, sekaligus melindungi lingkungan dan masyarakat. Untuk menuntaskan salah satu tantangan besar penerapan ekonomi hijau di Indonesia, berupa rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya ekonomi hijau, maka dibutuhkan peran lembaga pendidikan dan kurikulum yang terintegrasi dengan konsep ekonomi hijau, sehingga dapat memudahkan proses transfer pengetahuan dan pemahaman tentang ekonomi hijau di Indonesia.

1. 2. Kurikulum Pendidikan Ekonomi Hijau

Kurikulum merupakan suatu program rencana pembelajaran yang menjadi pedoman dari pendidik dan peserta didik sehingga pengalaman pembelajaran menjadi terstruktur, terarah dan terencana. Hal ini senada dengan pendapat Daniel Tanner dan Laurier Tanner yang menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat pembelajaran yang terencana, terarah dan terstruktur yang melibatkan proses rekonstruksi pengetahuan pengalaman belajar secara sistematis oleh lembaga pendidikan terkait.² Adapun kurikulum sesuai Undang-undang No 20 tahun 2003 yaitu seperangkat rencana serta pengaturan tentang tujuan, bahan pengajaran, isi dan cara yang dilaksanakan untuk dipedomani dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan Nasional.³

Menurut tim pengembang MKDP kurikulum dan pembelajaran, dalam bukunya Kurikulum dan Pembelajaran, istilah kurikulum (*curriculum*) berasal dari kata *curir* (pelari) dan *curere* (tempat berpacu), dan pada awalnya digunakan dalam dunia olah raga. Pada saat itu kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start sampai finis untuk memperoleh medali atau penghargaan. Kemudian, pengertian tersebut diterapkan dalam dunia pendidikan menjadi sejumlah mata pelajaran (*subject*) yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari awal sampai akhir program pelajaran untuk memperoleh penghargaan dalam bentuk ijazah⁴.

Konsep ekonomi hijau dan kurikulum dalam sebuah pembelajaran yang terarah dapat diintegrasikan. Dengan cara ini sosialisasi dan pembelajaran tentang konsep ekonomi hijau lewat dunia pendidikan dan kurikulum dapat dipadukan dan saling menunjang. Integrasi konsep ekonomi hijau kedalam kurikulum pendidikan adalah cara untuk menjembatani kesenjangan pemahaman masyarakat tentang ekonomi hijau.

² <https://www.dosen-pendidikan.co.id/pengertiankurikulummenurutparaahli/>

³ Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

⁴ Kurikulum dan Pembelajaran, 2016, Tim pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, Koordinator Dr, Toto Ruhimat, M.Pd

Melalui peran aktif lembaga pendidikan dan integrasi konsep ekonomi hijau dengan kurikulum pendidikan, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung program-program ekonomi hijau. Dunia pendidikan adalah sektor yang berperan penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang kompeten, beretika, dan berwawasan lingkungan. Ekonomi hijau membutuhkan dukungan dunia pendidikan, baik dalam hal peningkatan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap yang ramah lingkungan. Peran perguruan tinggi dalam dunia pendidikan sangat penting terutama dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, memajukan pengetahuan dan mengembangkan berbagai inovasi melalui penelitian, serta mendukung pembangunan masyarakat dan ekonomi melalui layanan dan kemitraan dengan berbagai pihak. Perguruan Tinggi dapat memberikan literasi keilmuan dan penerapannya di bidang lingkungan, serta mengembangkan kurikulum yang mengintegrasikan isu keberlanjutan. Perguruan Tinggi juga dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap isu-isu lingkungan, serta membangun kapasitas dan keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan⁵.

Ekonomi hijau dan dunia Pendidikan terutama Perguruan Tinggi adalah dua hal yang saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain. Perguruan Tinggi adalah salah satu sektor yang dapat berperan penting dalam mewujudkan ekonomi hijau, baik melalui kurikulum, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat. Perguruan Tinggi dapat berperan untuk mendukung ekonomi hijau dengan cara mengembangkan integrasi kurikulum pendidikan ekonomi hijau, berwawasan lingkungan, yang mencakup materi-materi yang berkaitan dengan isu-isu ekologis, seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah, transportasi berkelanjutan, pertanian dan pangan berkelanjutan.

⁵<https://katadata.co.id/ekonopedia/istilah-ekonomi/6581c29a31500/ekonomi-hijau-definisi-karakteristik-dan-urgensi-penerapannya>, <https://katadata.co.id/ekonopedia/istilah-ekonomi/6581c29a31500/ekonomi-hijau-definisi-karakteristik-dan-urgensi-penerapannya>

Dengan integrasi konsep ekonomi hijau dan kurikulum pendidikan yang sistematis dan demokratis, diharapkan usaha untuk memberikan sosialisasi pemahaman tentang ekonomi hijau di lembaga pendidikan pada semua jenjang pendidikan formal, khususnya Perguruan Tinggi dapat terlaksana dengan baik.

1. 3. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan suatu proses pembangunan dengan maksimalisasi pengelolaan sumber daya alam yang ada dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup masyarakat saat ini tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat dimasa mendatang. Konsep dan istilah pembangunan berkelanjutan pertama kali diperkenalkan oleh *World Commission on Environment and Development (WCED)* pada tahun 1987.

WCED adalah suatu komisi independen yang membahas dan memberikan masukan rekomendasi bagi permasalahan-permasalahan global lingkungan pasca konferensi Stockholm pada tahun 1972. Menurut WCED pembangunan berkelanjutan yaitu suatu proses pembangunan yang mengupayakan bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan hidup dihari ini tanpa mengurangi pemenuhan kebutuhan hidup generasi yang akan datang⁶. Pada perkembangan berikutnya banyak para ahli yang mendefinisikan pengertian pembangunan berkelanjutan, diantaranya menurut Budimanta, pembangunan berkelanjutan merupakan cara pandang tentang kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dan terencana untuk peningkatan kualitas kehidupan, kesejahteraan, dan lingkungan dari manusia dengan tidak mengurangi terhadap akses maupun kesempatan kepada generasi mendatang. Adapun Soemarwoto mendefinisikan kata pembangunan berkelanjutan sebagai adanya perubahan positif dari sosial ekonomi dengan tidak mengabaikan sistem sosial ekologi dimana masyarakat sangat bergantung kepadanya. Menurut ahli lainnya, seperti William Ascher dan Robert Healy, pada buku "*Natural Resource Policymaking in Developing Countries*" mengungkapkan tentang pembangunan berkelanjutan merupakan suatu cara dan strategi pembangunan dengan memaksimalkan keuntungan untuk jangka panjang dengan menghindari eksploitasi sumber daya alam secara massif.

⁶ <https://dosengeografi.com/pembangunan-berkelanjutan/>

Karena ini sesungguhnya hanya memberikan keuntungan untuk jangka pendek. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan konsep pembangunan dengan mengedepankan keseimbangan sektor sosial, ekonomi, dan lingkungan. Lebih lanjut pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai sebuah upaya yang sadar dan terencana dengan memadukan aspek lingkungan hidup, ekonomi dan sosial pada strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kesejahteraan, kemampuan, dan mutu hidup generasi masa kini hingga generasi masa depan.

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan berkelanjutan sesungguhnya bersifat jangka panjang lintas generasi, dan mengisyaratkan bahwa generasi masa kini tidak boleh menghabiskan sumberdaya alam yang tersedia saat ini tanpa menyisakan sumber daya alam tersebut untuk kepentingan generasi yang akan datang baik ditinjau dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Dengan demikian, konsep pembangunan berkelanjutan ini menekankan akan pentingnya berwawasan jauh kedepan dan bersifat jangka panjang, dengan memanfaatkan seluruh potensi sumberdaya alam secara bijaksana, dengan menjaga keseimbangan antara sosial, ekonomi, dan lingkungan demi mendukung terwujudnya kehidupan yang berkelanjutan.

1. 4. Pemahaman ekonomi hijau penting bagi mahasiswa

Pemahaman tentang ekonomi hijau sangat penting bagi mahasiswa, terutama dikaitkan dengan pembangunan berkelanjutan, karena pemahaman mahasiswa akan ekonomi hijau, akan memiliki dampak yang luas dan relevan dalam beberapa aspek. *Pertama*, aspek kesadaran lingkungan, mahasiswa yang memahami ekonomi hijau akan lebih sadar akan isu-isu lingkungan. Mereka dapat mengenali bagaimana keputusan ekonomi mempengaruhi alam dan bagaimana melibatkan solusi berkelanjutan. *Kedua*, aspek inovasi dan solusi, yaitu mahasiswa yang memahami ekonomi hijau dapat menciptakan inovasi dan solusi yang ramah lingkungan. Mereka dapat menggabungkan pengetahuan ekonomi dengan pemikiran kreatif untuk mengatasi tantangan lingkungan.

Ketiga, aspek pengaruh pada kebijakan, dimana mahasiswa dapat mempengaruhi kebijakan melalui pengetahuan mereka tentang ekonomi hijau. Mahasiswa dapat berpartisipasi dalam diskusi, kampanye, dan advokasi untuk perubahan positif⁷. Dalam konteks pembangunan, pemahaman tentang ekonomi hijau membantu mahasiswa memahami bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat dicapai tanpa merusak lingkungan. Dalam konteks menyampaikan gagasan dan konsep integrasi ekonomi hijau dan kurikulum pendidikan, mahasiswa juga menjadi sasaran pendengar dan pembelajar yang efektif. Sehingga mahasiswa memiliki peran kunci dalam mewujudkan ekonomi hijau. Untuk itu integrasi ekonomi hijau ke dalam kurikulum pendidikan di perguruan tinggi menjadi penting dan relevan.

Penulisan Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) ini diharapkan menjadi media dan instrumen untuk menyampaikan gagasan dan konsep mengenai integrasi ekonomi hijau dan kurikulum pendidikan guna mendorong pembangunan berkelanjutan lewat kurikulum pendidikan tinggi di kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat ini di kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memang belum secara spesifik menerapkan kurikulum ekonomi hijau seperti di ITB, namun konsep-konsep lingkungan dan kampus hijau sedang terus dilakukan. Diharapkan dengan penulisan Taskap ini penulis dapat memberikan kontribusi bagi upaya mengukuhkan UIN Jakarta sebagai kampus hijau.

Saat ini di beberapa kampus yang berbasis pada ilmu pengetahuan lingkungan dan teknologi seperti Institut Teknologi Bandung (ITB), telah berupaya mengintegrasikan isu-isu keberlanjutan, termasuk memasukan konsep ekonomi hijau di dalam kurikulum pendidikannya. Harapannya dengan integrasi ekonomi hijau kedalam kurikulum pendidikan, konsep ini bisa diterapkan di semua perguruan tinggi, dan dapat menghadirkan kurikulum pendidikan yang bisa diterapkan pada seluruh perguruan tinggi di Indonesia, khususnya di kampus UIN Jakarta.

⁷ <https://amf.or.id/ekonomi-hijau-dan-peran-perguruan-tinggi-dalam-mewujudkannya/>

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang serta fakta kondisi yang terjadi, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam Taskap ini adalah, **Bagaimana integrasi ekonomi hijau dan kurikulum pendidikan guna mendorong pembangunan yang berkelanjutan?.**

Dari uraian rumusan masalah di atas dapat ditarik beberapa pertanyaan kajian sebagai pokok bahasan yaitu:

- a. Bagaimana pelaksanaan materi kuliah tentang ekonomi hijau pada kurikulum pendidikan di perguruan tinggi saat ini?
- b. Bagaimana kurikulum pendidikan dapat mendorong pembangunan yang berkelanjutan?
- c. Bagaimana strategi integrasi ekonomi hijau dan kurikulum pendidikan guna mendorong pembangunan berkelanjutan?

3. Maksud Dan Tujuan

a. Maksud

Maksud pembahasan dalam Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (TASKAP) ini adalah memberikan gambaran cara integrasi ekonomi hijau dan kurikulum pendidikan guna mendorong pembangunan berkelanjutan.

b. Tujuan

Adapun tujuan penulisan Kertas Karya Ilmiah Perseorangan TASKAP ini adalah untuk menyampaikan gagasan dan konsep mengenai integrasi ekonomi hijau dan kurikulum pendidikan guna mendorong pembangunan berkelanjutan.

4. Ruang Lingkup Dan Sistematika

a. Ruang Lingkup

Dalam penulisan Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) ini, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan pada penyelenggaraan integrasi ekonomi hijau dan kurikulum serta analisis kebijakan dan penerapannya pada kurikulum pendidikan di lingkungan pendidikan tinggi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

b. Sistmatika

Penulisan Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (TASKAP) ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- 1) BAB I PENDAHULUAN. Bab ini berisi uraian secara garis besar tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, maksud dan tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan, sistematika penulisan, metode dan pendekatan yang dipergunakan, serta beberapa pengertian dan isitlah yang digunakan.
- 2) BAB II LANDASAN PEMIKIRAN. Pada Bab ini yang dibahas adalah, peraturan perundang-undangan, kerangka teoritis yang akan digunakan, fakta dan data seputar permasalahan, serta tinjauan lingkungan strategis yang relevan dan memberi dampak pengaruh positif dan negatif pada pembahasan integrasi ekonomi hijau dan kurikulum pendidikan guna mendorong pembangunan berkelanjutan.
- 3) BAB III PEMBAHASAN. Pada bab ini diuraikan mengenai analisa sejumlah persoalan dimana pembahasan didasarkan pada data dan fakta yang di dapatkan serta landsan teori yang relevan, guna menemukan faktor penyebab masalah dan solusi penyelesaiannya.
- 4) BAB IV PENUTUP. Pada bab ini penulis menyampaikan tentang kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan berisi uraian singkat terkait hasil temuan dan jawaban atas analisis dari berbagai aspek pada uraian rumusan masalah. Sedangkan rekomendasi berisi masukan dan saran penulis kepada pemangku kebijakan.

5. Metode Dan Pendekatan

a) Metode

Metode yang digunakan dalam penulisan TASKAP ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Proses pencarian, pengumpulan dan analisis masalah, memakai teknik studi kepustakaan, melalui cara pengumpulan dan analisa dengan referensi berbagai tulisan akademis berupa dokumen, artikel ilmiah, melalui dokumen tertulis atau sumber internet lembaga resmi dan kredibel terkait fakta empiris, teori, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan.

Metode lain yang digunakan dalam penulisan ini adalah: *Pertama*, analisis SWOT merupakan salah satu analisis yang banyak digunakan oleh organisasi, perusahaan maupun lembaga pemerintahan⁸. Analisis ini banyak digunakan karena merupakan analisis yang cukup mendasar dalam menentukan solusi terbaik dalam mengatasi persoalan yang dihadapi organisasi. Metode ini diperkenalkan oleh Albert Humphrey ketika melakukan penelitian di Stamford University pada sekitar tahun 1960-1970⁹.

Kedua, menggunakan metode deskriptif analisis PESTLE yang merupakan suatu metode analisis dengan cara identifikasi berbagai faktor eksternal yang dapat memberikan pengaruh terhadap suatu organisasi, seperti faktor sosial, ekonomi, politik, hukum, teknologi dan faktor lingkungan. Metode analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi suatu organisasi atau bisnis. Analisa PESTLE dapat digunakan untuk mempertimbangkan faktor-faktor permasalahan eksternal, yaitu Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi, Hukum, dan Lingkungan. Analisa dengan metode ini membantu organisasi untuk mengetahui kemungkinan efek dari faktor-faktor dimaksud, dan menanggapinya, serta mengembangkan strategi yang sesuai. Analisa dengan metode ini biasanya dilakukan setiap enam bulan atau sesuai dengan perubahan lingkungan eksternal.¹⁰ Dan *Ketiga* metode Analisa Dynamic Governance, merupakan suatu metode analisis yang bisa mengidentifikasi dan menyesuaikan berbagai faktor eksternal yang dapat berpengaruh terhadap organisasi dengan konteks yang bisa saja berubah-ubah.

Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menyesuaikan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi suatu organisasi dalam konteks yang berubah-ubah. Analisa Dynamic Governance melibatkan tiga pola pikir utama, yaitu:

⁸ I Gusti Ngurah Alit Wiswasta. I Gusti Ayu Ari Agung. I Made Tamba. 2018. Analisa SWOT (Kajian Perencanaan Model, Strategi, Dan Pengembangan usaha). Universitas Mahasaraswati Press.

⁹ https://en.wikipedia.org/wiki/Albert_S._Humphrey

¹⁰ <https://www.jurnal.id/id/blog/model-bisnis-pestel/>

- Thinking ahead: berfikir jauh ke depan tentang masa depan yang mungkin terjadi dan dampaknya terhadap organisasi atau bisnis.
- Thinking again: berfikir kembali tentang kebijakan dan program yang ada dan mengevaluasinya secara kritis dan kreatif untuk mencari perbaikan atau perubahan.
- Thinking across: berfikir secara terbuka dan belajar dari pengalaman dan pengetahuan dari pihak lain, baik di dalam maupun di luar organisasi atau bisnis.

Analisa Dynamic Governance bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas dinamis organisasi atau bisnis, yaitu kemampuan untuk beradaptasi, berinovasi, dan berkontribusi dalam lingkungan yang kompetitif dan berkelanjutan¹¹.

b) Pendekatan

Dalam penyusunan dan pembahasan Taskap ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif analisis yang dilakukan secara komprehensif. Tulisan deskriptif dengan penyajian hasil penelitian berupa narasi dan uraian hingga interpretasi atas suatu fenomena yang menjadi objek penelitian. Jenis penelitian deskripsi tetap memegang unsur-unsur penelitian yang sistematis, aktual dan akurat.

Menurut Kriyantono (2007), jenis penelitian deskriptif memang bertujuan untuk membuat deskripsi yang sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta dan sifat dari populasi atau objek tertentu. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti. Ini merupakan pendekatan yang sangat penting dalam penelitian sosial untuk memahami fenomena dengan lebih mendalam¹².

¹¹ <http://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jbp/article/view/1800>

¹² <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/10760/9/BAB%20III.pdf>

6. Pengertian

- **Ekonomi Hijau:** Ekonomi hijau adalah konsep pembangunan yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Ini melibatkan pertumbuhan ekonomi yang kuat tanpa mengesampingkan permasalahan lingkungan, dengan mengedepankan pembangunan rendah karbon serta inklusif secara sosial¹³. Tujuan utamanya adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang seimbang dengan menjaga keseimbangan ekosistem dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan alam. Ekonomi hijau juga diharapkan dapat mendukung pembangunan berkelanjutan dengan memahami bahwa konflik antara ekonomi dan lingkungan dapat terekonsiliasi dengan baik.
- **Pembangunan Berkelanjutan:** Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan hidup masa sekarang dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup generasi mendatang. Prinsip utama pembangunan berkelanjutan ialah mempertahankan kualitas hidup bagi seluruh manusia pada masa sekarang dan pada masa depan secara berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan juga menghargai keragaman budaya sebagai alat untuk mencapai kepuasan intelektual, emosional, moral, dan spiritual. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan ekonomi, tetapi juga meliputi pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan merupakan pilar pendorong bagi pembangunan berkelanjutan¹⁴.
- **Integrasi kurikulum:** integrasi kurikulum adalah proses pengembangan kurikulum yang menggabungkan berbagai aspek pendidikan untuk menciptakan pengalaman belajar yang holistik dan koheren bagi peserta didik. Proses ini melibatkan penyatuan kurikulum dari berbagai disiplin ilmu, baik itu pendidikan umum maupun agama, dengan tujuan untuk memperkaya pembelajaran dan mempersiapkan siswa dengan kompetensi yang relevan untuk kehidupan mereka di masyarakat¹⁵.

¹³ <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-ekonomi-hijau/>

¹⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_berkelanjutan

¹⁵ https://www.academia.edu/50048355/Pengembangan_Integrasi_Kurikulum

Pengembangan kurikulum terintegrasi di sekolah atau madrasah atau perguruan tinggi mencakup konsepsi terpadu dari visi dan misi institusi, integrasi institusional, integrasi kurikulum dan pembelajaran dengan model yang sesuai untuk disiplin tunggal, lintas beberapa disiplin, dan pendekatan yang digunakan model rasional-interaksi, serta model rasional deduktif untuk membagi peran antara kepala sekolah dan guru, serta untuk mengatur komponen pendidikan yang mendukung integrasi. Model-model integrasi kurikulum yang dapat digunakan antara lain *fragmented*, *connected*, *nested*, *sequenced*, *shared*, *webbed*, *threaded*, *integrated*, *immersed*, dan *networked*, yang masing-masing memiliki karakteristik dan penerapan yang berbeda dalam konteks pendidikan¹⁶.

- **Kurikulum Pendidikan:** Kurikulum pendidikan adalah seperangkat rencana dan pengaturan yang mencakup tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta metode yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum berfungsi sebagai acuan bagi siswa untuk mengetahui materi apa saja yang harus dipelajari dan dipahami, serta bagi guru sebagai pedoman pengajaran¹⁷. Di Indonesia, kurikulum pendidikan telah mengalami beberapa perubahan, mulai dari kurikulum 1947, kurikulum 1994, kurikulum 2006, kurikulum 2013, hingga Kurikulum Merdeka yang digunakan saat ini. Tujuan dari kurikulum adalah untuk menghasilkan siswa yang berintegrasi, memahami sistem pendidikan yang diterapkan, dan siap masuk ke dalam kehidupan bermasyarakat. Kurikulum juga diartikan sebagai panduan yang mengatur seluruh komponen pembelajaran di lembaga pendidikan, termasuk tujuan, isi, metode, dan evaluasi, yang menggambarkan visi dan misi pendidikan serta strategi yang akan dilakukan untuk mencapainya¹⁸.

¹⁶<https://media.neliti.com/media/publications/321436-pengembangan-kurikulum-terintegrasi-di-s-e7740704.pdf>

¹⁷<https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/02/101008069/kurikulum-pengertian-fungsi-tujuan-dan-komponennya>

¹⁸ <https://wikipedia.co.id/pengertian-kurikulum-pendidikan/>

BAB II

LANDASAN PEMIKIRAN

7. Umum

Konsep ekonomi hijau pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Ini adalah konsep yang menggunakan pendekatan berkelanjutan dan inklusif, yang tidak hanya memperhatikan efisiensi ekonomi tetapi juga keadilan sosial dan pengurangan risiko lingkungan serta kelangkaan ekologis¹⁹. Konsep ini juga menekankan pentingnya transisi menuju praktik ekonomi yang rendah karbon, efisien sumber daya, dan inklusif secara sosial. Dengan demikian, ekonomi hijau dapat menjadi solusi atas persoalan global seperti perubahan iklim dan degradasi lingkungan, sekaligus membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Ekonomi hijau adalah pola pembangunan yang mensinergikan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya memperlakukan sumber daya alam dengan bijaksana. Praktek ekonomi hijau sangat berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan yang tidak merusak atau mengorbankan sumber daya alam, lingkungan, atau kesejahteraan sosial. Dengan fokus pada efisiensi sumber daya, pengurangan limbah, dan penggunaan teknologi ramah lingkungan, ekonomi hijau dapat memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara berkelanjutan dari generasi ke generasi. Jadi ekonomi hijau memiliki kontribusi yang besar dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Berikutnya pendidikan memiliki peran penting dalam transformasi menuju ekonomi hijau. Karena dengan pendidikan kita dapat membangun kesadaran tentang pentingnya ekonomi hijau dan dampak positifnya terhadap lingkungan dan masyarakat. Dengan pendidikan setiap orang dapat diajak memahami konsep pengurangan emisi, efisiensi energi, dan penggunaan sumber daya berkelanjutan. Dengan Pendidikan dapat dikembangkan ketrampilan yang diperlukan untuk inovasi dan penerapan ekonomi hijau.

¹⁹ <https://www.unep.org/explore-topics/green-economy/about-green-economy>

Pendidikan juga dapat mempersiapkan tenaga kerja yang terampil untuk industri yang berfokus pada keberlanjutan dan ekonomi hijau²⁰. Untuk menyesuaikan kurikulum pendidikan agar mencakup konsep-konsep ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan, *pertama*, kurikulum harus diintegrasikan dengan materi yang mengajarkan tentang pembangunan berkelanjutan, termasuk aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ini bisa mencakup pelajaran tentang energi terbarukan, efisiensi sumber daya, dan pengelolaan limbah yang berkelanjutan²¹. *Kedua*, kurikulum harus dirancang untuk mengembangkan ‘*green skills*’, seperti kesadaran lingkungan, inovasi berkelanjutan, dan manajemen sumber daya alam.

Sebelum melakukan pembahasan dan menganalisa berbagai aspek yang mempengaruhi integrasi ekonomi hijau dan kurikulum pendidikan guna mendorong pembangunan yang berkelanjutan, terlebih dahulu perlu dilakukan pemaparan sejumlah regulasi dan produk hukum yang dapat menjadi landasan hukum, kemudian beberapa data-data dan fakta yang berkaitan dengan tema yang diangkat, sejumlah teori yang bisa menjadi landasan berpikir serta melihat sejumlah faktor yang berpengaruh terhadap pemecahan masalah.

8. Peraturan dan Perundang-Undangan

a. Paradigma Nasional

1. Pancasila

Pancasila adalah dasar negara sebagai landasan idiil bangsa Indonesia, yang berstatus sebagai standar tujuan dan norma tertinggi negara serta sumber dari segala sumber hukum dan tatanan negara hukum negara kesatuan republik Indonesia (NKRI). Dalam peraturan MPR No.II/MPR/2000 tentang sumber hukum menyatakan bahwa Pancasila dan UUD 1945 menjadi sumber konstitusi negara²². Kedudukan Pancasila ini dipertegas dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara²³.

²⁰ <https://www.unesco.org/en/sustainable-development/education/greening-future>

²¹ <https://www.iesalc.unesco.org/eng/wp-content/uploads/2021/03/Otieno-EN.pdf>

²² Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, bidang Studi:4 Konsensus dasar bang, Sub Bidang:Pancasila, UUD NRI tahun 1945, NKRI dan bhineka tunggal

²³ <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5661806/landasan-idiil-bangsa-indonesia-penjelasan->

2. UUD NRI Tahun 1945

UUD NRI Tahun 1945 adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang merupakan konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia. UUD 1945 menjadi perwujudan dari dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, yang disebutkan secara gamblang dalam Pembukaan UUD 1945. Perumusan UUD 1945 dimulai dengan kelahiran dasar negara Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang pertama BPUPK. UUD 1945 diberlakukan secara resmi sebagai konstitusi negara Indonesia oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945²⁴. UUD 1945 Pasal 33 ayat (4) menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional²⁵. Pasal 33 ayat 4 dari UUD 1945 sesungguhnya mengatur tentang ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan. Pasal ini merupakan dasar konstitusional yang mendukung implementasi konsep ekonomi hijau di Indonesia, yang bertujuan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan ekonomi nasional. Ini mencakup upaya-upaya seperti pengurangan emisi gas rumah kaca, penggunaan sumber daya alam yang lebih efisien, dan pengurangan limbah, serta memperkecil kesenjangan sosial²⁶.

Dengan demikian, Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan ekonomi yang tidak hanya tumbuh secara ekonomis tetapi juga ramah lingkungan dan berkelanjutan²⁷.

dan-maknanya-udah-tahu

²⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945

²⁵ <https://kumparan.com/berita-hari-ini/isi-dan-makna-pasal-33-uud-1945-sebagai-landasan-perekonomian-bangsa-1vKHY9Y3QHd>

²⁶ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19042>

²⁷ <https://jhli.icel.or.id/index.php/jhli/article/view/222>

b. UU No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

UU ini dikenal dengan nama Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025²⁸. UU ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 2005 hingga 2025. RPJPN adalah pedoman yang menguraikan arah dan tujuan pembangunan jangka panjang di Indonesia. Dokumen ini mencakup strategi, prioritas, dan langkah-langkah untuk mencapai visi pembangunan nasional. Jadi, UU No. 17 Tahun 2007 mengatur tentang RPJPN yang menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan pembangunan jangka panjang di Indonesia. RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional periode 20 tahunan yang terhitung sejak 2005 sampai 2025. RPJPN menggantikan GBHN dan menjadi acuan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan jangka panjang. RPJPN mencakup visi, misi, dan strategi pembangunan nasional serta arah kebijakan di berbagai sektor, termasuk ekonomi, lingkungan, dan sosial.

c. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur berbagai aspek terkait lingkungan hidup di Indonesia²⁹. UU ini menguraikan keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup. Menetapkan kejelasan wewenang antara pusat dan daerah dalam mengelola lingkungan. UU ini mendefinisikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup serta mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

²⁸ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39830/uu-no-17-tahun-2007>

²⁹ https://pslb3.menlhk.go.id/portal/uploads/laporan/1548333565_UU_NO_32_2009.pdf

Aspek yang diatur meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Jadi, Undang-undang No. 32 Tahun 2009 adalah instrumen hukum yang sangat relevan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di Indonesia.

d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur berbagai aspek terkait sistem pendidikan di Indonesia. UU Nomor 20 tahun 2003 ini menguraikan dasar, fungsi, dan tujuan sistem pendidikan nasional³⁰. Sistem pendidikan nasional harus berakar pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UU ini menetapkan prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam penyelenggaraan pendidikan. Prinsip ini mencakup aspek hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah.

e. UU No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas konvensi kerangka kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan iklim)

UU ini memastikan bahwa Indonesia secara resmi mengakui dan menyetujui Paris Agreement, yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 22 April 2016 di New York, Amerika. Perjanjian ini bertujuan untuk mengatasi perubahan iklim dan memperkuat kerjasama internasional dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengadaptasi dampak perubahan iklim³¹. UU ini memiliki peran penting dalam mengarahkan upaya Indonesia menuju pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan.

³⁰ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003>

³¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37573>

f. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Undang-undang ini membahas berbagai aspek terkait pendidikan tinggi di Indonesia, termasuk pengaturan tentang lembaga pendidikan tinggi, pengelolaan pendidikan tinggi, standar pendidikan tinggi, akreditasi, dan hal-hal lain yang terkait dengan pengembangan dan pengelolaan sistem pendidikan tinggi di Indonesia.

g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

PP ini mengatur lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia, termasuk mengenai struktur dan organisasi perguruan tinggi, pengelolaan keuangan, standar akademik, pengembangan kurikulum, serta berbagai aspek lain yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

h. Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.

Perpres ini merupakan komitmen Pemerintah Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional. Jadi Perpres No. 61 Tahun 2011 memiliki peran penting dalam mengarahkan upaya Indonesia menuju pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan³².

i. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum

Peraturan ini memberikan pedoman penyusunan dan pengelolaan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dalam peraturan ini, terdapat ruang untuk mengintegrasikan muatan lokal, kegiatan ekstrakurikuler, dan evaluasi kurikulum yang relevan dengan isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

³² <https://jdih.bappenas.go.id/berita/detailberita2/305>

j. **Peraturan Presiden (Perpres Nomor 111. Tahun 2022, tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.**

Perpres ini menetapkan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) nasional untuk tahun 2024. Sasaran ini disusun dengan mengacu pada tujuan dan sasaran global TPB tahun 2030 serta sasaran nasional rencana pembangunan jangka nasional tahun 2020-2024³³.

k. **Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 telah memasukkan ekonomi hijau sebagai bagian dari perencanaan pembangunan. Dalam RPJMN ini, terdapat tiga program prioritas yang berfokus pada ekonomi hijau, antara lain³⁴:

1. Peningkatan kualitas lingkungan: program ini bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan melalui berbagai upaya, termasuk pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan perlindungan lingkungan.
2. Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim: Program ini mengarah pada penguatan ketahanan terhadap bencana alam dan perubahan iklim. Dalam konteks ekonomi hijau, ini mencakup langkah-langkah untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan memperkuat ketahanan masyarakat.
3. Pembangunan rendah karbon: program ini berfokus pada pengurangan emisi gas rumah kaca dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan.

³³ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/227039/perpres-no-111-tahun-2022>

³⁴ <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5206679/3-program-prioritas-pemerintah-capai-ekonomi-hijau-di-rpjm-2020-2024>

9. Data dan Fakta

a. Kondisi pelaksanaan materi kuliah tentang ekonomi hijau pada kurikulum pendidikan di perguruan tinggi saat ini

Saat ini di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta belum secara spesifik mengajarkan mata kuliah tentang ekonomi hijau atau ada kurikulum hijau. Namun sejak 2020³⁵, UIN Jakarta sudah berupaya berbenah menjadi kampus hijau. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sebagai institusi pendidikan tinggi, memiliki berbagai kegiatan dan program yang mendukung inisiatif Kampus Hijau. Berikut adalah beberapa kegiatan dan program yang ada di kampus UIN Jakarta terkait dengan konsep Kampus Hijau.

1. Pengelolaan Lingkungan Kampus:

- **Penanaman Pohon dan Ruang Terbuka Hijau:** Kampus UIN Jakarta memiliki program untuk menanam pohon dan memperluas ruang terbuka hijau, yang membantu meningkatkan kualitas udara dan menciptakan lingkungan yang lebih sejuk.
- **Pemeliharaan Taman Kampus:** Pengelolaan taman yang berkelanjutan untuk mendukung keanekaragaman hayati dan memberikan ruang hijau bagi komunitas kampus.

2. Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang:

- **Sistem Daur Ulang:** Implementasi sistem daur ulang untuk mengelola sampah kampus, termasuk pemisahan sampah organik dan non-organik serta pengelolaan limbah elektronik.
- **Kampanye Pengurangan Sampah:** Mengadakan kampanye untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya daur ulang dan membuat bank sampah. UIN Jakarta menjadi kampus hijau. Hal ini dapat dilihat dari surat edaran No. 09/2024, yang telah resmi ditandatangani. Dalam surat tersebut, diuraikan langkah-langkah komprehensif untuk mengurangi penggunaan plastik.

³⁵ Green Campus: Menyambut UIN Jakarta Menjadi Kampus yang Ramah Lingkungan | Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Website Resmi (uinjkt.ac.id)

3. Edukasi dan Kesadaran Lingkungan: lewat seminar dan Workshop atau kegiatan yang membahas isu-isu lingkungan dan keberlanjutan untuk mahasiswa dan staf.

4. Inisiatif Kesehatan dan Kesejahteraan:

- Program Kesehatan Lingkungan: Melakukan program untuk meningkatkan kesehatan lingkungan, seperti pemantauan kualitas udara dan penyediaan air bersih. Larangan merokok di lingkungan kampus UIN Jakrta
- Fasilitas Kesehatan Berkelanjutan: Menyediakan fasilitas yang mendukung gaya hidup sehat dan ramah lingkungan bagi komunitas kampus.

5. Kemitraan dan Kolaborasi:

- Kerja Sama dengan Organisasi Lingkungan: Berkolaborasi dengan organisasi lingkungan untuk melaksanakan inisiatif keberlanjutan dan mengembangkan proyek-proyek hijau.
- Kemitraan juga menjadi strategi penting UIN Jakarta dalam implementasi kampus hijau. UIN Jakarta telah menerima dukungan mitra seperti komitmen perusahaan energi asal Uni Emirat Arab, Masdar Energy, untuk membangun panel surya bagi kebutuhan energi ramah lingkungan UIN Jakarta.

6. Sertifikasi dan Penghargaan:

UIN Jakarta telah bergabung dalam UI Greenmetric World University Rankings sejak 2020 lalu bersama 912 perguruan tinggi dunia, termasuk diantaranya 87 perguruan tinggi nasional. Pada pemeringkatan di tahun pertama keanggotaannya, ranking green campus UIN Jakarta baru mencapai 667 dunia atau 57 tingkat nasional.

7. UIN Jakarta telah meresmikan lembaga yang fokus terhadap

TPB/SDGs, pada tanggal (13/6/2023), dengan nama SDGs Center UIN Jakarta, dan menjadi pusat SDGs ke-38 yang berdiri di perguruan tinggi seluruh Indonesia.

Berikut beberapa fakta perguruan tinggi lain yang telah menjadi kampus hijau dan melaksanakan materi kuliah tentang ekonomi hijau pada kurikulum pendidikan di perguruan tinggi selain UIN Jakarta saat ini:

- ITB telah menerapkan kurikulum hijau, terutama pada Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH). Pada tahun 2019, ITB mengintegrasikan isu keberlanjutan ke dalam kurikulumnya. Di dalamnya, terdapat pemahaman tentang etika lingkungan (*deep ecology*) dan keterkaitan antara sistem ekologi dan sistem sosial³⁶. Perguruan tinggi lainnya juga dapat mengadopsi pendekatan serupa dengan mengintegrasikan isu-isu lingkungan dan ekonomi hijau ke dalam kurikulum mereka.
- Lebih dari 100 program studi di perguruan tinggi dan lembaga pelatihan di Indonesia secara aktif terlibat dalam isu lingkungan dan perubahan iklim. Sekitar seperempat dari program studi ini melaksanakan kegiatan pembelajaran terkait ekonomi hijau³⁷.
- Ada 20 kampus yang masuk dalam Pemeringkatan UI *Green Metric World University Rankings* tahun 2023 dari 185 kampus yang mendaftar di Indonesia³⁸. UI Green Metric adalah peringkat internasional tahunan tentang kinerja keberlanjutan universitas. Peringkat ini mengukur upaya universitas dalam mengurangi jejak ekologis kampus dan pendidikan serta penelitian berkelanjutan terkait keberlanjutan. Universitas diberikan skor berdasarkan komitmen dan inisiatif mereka dalam hal ini.

³⁶ <https://amf.or.id/ekonomi-hijau-dan-peran-perguruan-tinggi-dalam-mewujudkannya/>

³⁷ <https://www.un-page.org/static/c6c29f85f70d81b06640290b40dc73f7/2021-indonesia-green-economy-learning-assessment-ind.pdf>

³⁸ <https://www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-6457426/20-universitas-hijau-indonesia-versi-ui-greenmetric-2022-ada-kampusmu>

b. Kondisi kurikulum pendidikan yang dapat mendorong pembangunan berkelanjutan saat ini

Saat ini, banyak upaya telah dilakukan untuk mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam kurikulum pendidikan sebagai bagian dari upaya untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Berikut adalah beberapa fakta dan data yang ada:

1. Terjadi peningkatan kesadaran: ada peningkatan kesadaran akan pentingnya keberlanjutan di kalangan pendidik, lembaga pendidikan, dan masyarakat umum. Hal ini mendorong permintaan untuk lebih banyak materi tentang keberlanjutan dalam kurikulum.
2. Terjadi perubahan kurikulum: banyak institusi pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, telah memperbarui kurikulum mereka untuk mencakup mata pelajaran atau program khusus yang berkaitan dengan keberlanjutan, seperti ilmu lingkungan, ekonomi hijau, atau pembangunan berkelanjutan³⁹.
3. Kemitraan dengan industri: beberapa lembaga pendidikan telah menjalin kemitraan dengan perusahaan dan organisasi non-pemerintah yang bergerak dalam bidang keberlanjutan untuk memperkaya pengalaman belajar siswa dengan pelajaran praktis dan pengetahuan tentang praktik terbaik di lapangan.
4. Pengembangan keterampilan: kurikulum pendidikan saat ini semakin memperhatikan pengembangan keterampilan yang relevan untuk pembangunan berkelanjutan, seperti pemecahan masalah, berpikir kritis, kerja tim, dan literasi lingkungan.
5. Pendidikan inklusif: ada upaya untuk memastikan bahwa pendidikan tentang keberlanjutan tidak hanya tersedia bagi mereka yang belajar di institusi formal, tetapi juga terbuka untuk masyarakat umum melalui program-program pelatihan, seminar, dan sumber daya pendidikan online.

³⁹<https://s3-csis-web.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/doc/5763ekonomi-hijau-dalam-visi->

6. Inovasi teknologi pendidikan, seperti platform pembelajaran daring dan permainan edukatif, juga digunakan untuk menyampaikan materi tentang keberlanjutan secara menarik dan interaktif kepada siswa dari berbagai latar belakang.
7. Evaluasi dan penilaian: semakin banyak institusi pendidikan yang memperhatikan penilaian yang mencerminkan tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk kriteria-kriteria seperti dampak lingkungan, kesejahteraan sosial, dan keadilan ekonomi.

Banyak kemajuan telah dicapai, akan tetapi masih ada tantangan dalam mengintegrasikan keberlanjutan secara menyeluruh ke dalam kurikulum pendidikan. Ini termasuk ketersediaan sumber daya, pelatihan pendidik, dan penyesuaian dengan perubahan lingkungan dan sosial yang terus berkembang. Namun, dengan komitmen yang kuat dan kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan, pendidikan dapat terus menjadi motor utama dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan di masa depan.

c. Kondisi strategi integrasi ekonomi hijau dan kurikulum pendidikan guna mendorong pembangunan berkelanjutan saat ini

Saat ini, terdapat upaya yang semakin meningkat untuk mengintegrasikan strategi ekonomi hijau ke dalam kurikulum pendidikan sebagai bagian dari upaya untuk mendorong pembangunan berkelanjutan.

Beberapa kondisi dan strategi terkait dengan hal ini meliputi:

1. Kemitraan antara pemerintah, industri, dan perguruan tinggi: ada dorongan untuk membangun kemitraan yang kuat antara pemerintah, industri, dan perguruan tinggi untuk mengidentifikasi kebutuhan pasar kerja yang berkaitan dengan ekonomi hijau dan mengintegrasikan kompetensi yang relevan ke dalam kurikulum pendidikan.

2. Pengembangan program studi dan mata kuliah khusus: banyak perguruan tinggi telah mulai menawarkan program studi atau mata kuliah khusus yang fokus pada ekonomi hijau atau pembangunan berkelanjutan. Ini termasuk program gelar dalam bidang-bidang seperti ilmu lingkungan, manajemen sumber daya alam, atau teknologi hijau.
3. Penekanan pada literasi ekonomi hijau: kurikulum pendidikan semakin menekankan literasi ekonomi hijau, yang mencakup pemahaman tentang prinsip-prinsip ekonomi yang berkelanjutan, seperti efisiensi sumber daya, daur ulang, dan energi terbarukan.
4. Pendidikan keusahawanan hijau: ada peningkatan minat dalam menyediakan pendidikan keusahawanan hijau yang mempersiapkan siswa untuk memulai bisnis yang berkelanjutan atau berkontribusi pada transformasi ekonomi menuju model yang lebih ramah lingkungan.
5. Pendekatan berbasis proyek: pendekatan pembelajaran berbasis proyek digunakan untuk memberikan pengalaman praktis kepada siswa dalam menerapkan konsep-konsep ekonomi hijau dalam konteks nyata. Ini dapat melibatkan proyek-proyek penelitian, pengembangan produk, atau perencanaan kebijakan.
6. Penekanan pada inovasi dan teknologi hijau: kurikulum pendidikan juga semakin memperhatikan inovasi dan teknologi hijau sebagai bagian dari strategi untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. Ini mencakup pemahaman tentang perkembangan teknologi terbaru dalam energi terbarukan, manajemen limbah, transportasi berkelanjutan, dan lain-lain.

10. Kerangka Teoritis

a. Konsep Ekonomi Hijau

Ekonomi hijau (*Green Economy*) adalah konsep ekonomi yang bertujuan untuk mengangkat kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat yang dibarengi dengan upaya menurunkan dampak kerusakan pada lingkungan. Istilah ekonomi hijau untuk kali pertama disampaikan dalam laporan “*Blueprint for a Green Economy*” dari sebuah tim para ekonom yang disampaikan kepada pemerintah Inggris ditahun 1989 agar mempertimbangkan konsep pembangunan yang berkelanjutan⁴⁰.

Sebuah otoritas global terkemuka bidang lingkungan hidup bernama UN Environment Programme (UNEP) mendefinisikan ekonomi hijau sebagai konsep ekonomi yang rendah karbon, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan inklusif secara sosial. Pada ekonomi hijau, peningkatan lapangan kerja dan pendapatan digerakkan oleh investasi pemerintah dan swasta pada sektor ekonomi, infrastruktur dan aset yang dimungkinkan terjadi penurunan emisi karbon dan polusi, peningkatan efisiensi energi dan sumber daya, serta pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati dan ekosistem. Sumber daya alam dianggap sebagai aset penting dan merupakan sumber daya publik, terutama bagi kelompok masyarakat miskin yang mata penghidupannya bergantung pada sumber daya alam. Oleh sebab itu, penerapan ekonomi hijau memiliki dampak positif bagi kehidupan sosial masyarakat yang inklusif. Ekonomi hijau merupakan konsep utama yang memayungi konsep ekonomi sirkular dan bioekonomi. Secara spesifik, ekonomi sirkular dan bioekonomi berfokus pada sumber daya, sedangkan pada prinsipnya ekonomi hijau mengakui peran yang terjadi dalam proses ekologi.

⁴⁰[https://pslh.ugm.ac.id/new-economic-for-sustainable-development-konsep-ekonomi-terbaru-untuk-pembangunan-berkelanjutan/#:~:text=Ekonomi%20hijau%20\(Green%20Economy\)%20merupakan,dengan%20mengurangi%20risiko%20kerusakan%20lingkungan.](https://pslh.ugm.ac.id/new-economic-for-sustainable-development-konsep-ekonomi-terbaru-untuk-pembangunan-berkelanjutan/#:~:text=Ekonomi%20hijau%20(Green%20Economy)%20merupakan,dengan%20mengurangi%20risiko%20kerusakan%20lingkungan.)

b. Teori Kurikulum

Pengertian kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 19, diartikan sebagai rangkaian agenda penataan tentang misi, isi, materi pengajaran juga menjadi suatu pedoman dalam menjalankan kegiatan agar kegiatan itu dapat segera cepat tercapai tujuan yang telah direncanakan⁴¹. Menurut Nana Syaodih, kurikulum merupakan “proses belajar mengajar (kurikulum) bisa dijadikan suatu arahan atau dijadikan suatu pegangan”⁴². Menurut Dede Rosyada, kurikulum merupakan inti dari sebuah penyelenggaraan pendidikan.

Murray Print mendefinisikan kurikulum sebagai semua ruang pembelajaran terencana yang diberikan kepada siswa oleh lembaga pendidikan dan pengalaman yang dinikmati oleh siswa saat kurikulum itu terapkan⁴³. Nurdin berpandangan kurikulum merupakan pedoman yang mencakup segala kegiatan belajar mengajar atau suatu proses yang mempengaruhi anak untuk pencapaian suatu tujuan. Di dalam kurikulum pengajar dengan menggunakan berbagai strategi, cara untuk memproses, dan mengevaluasi perkembangan belajar mengajar, dan sebagainya⁴⁴. Dede Rosyada juga menyatakan bahwa kurikulum merupakan sesuatu yang ditawarkan kepada pihak publik karena sebuah kurikulum menentukan sebuah dukungan SDM dari guru yang memang sangat berkualitas serta kurikulum ini nanti menjadi sebuah sarana dan juga sumber bahan ajar yang harus dipakai.

⁴¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 19.

⁴² Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung Remaja Rosdakarya, 2009)

⁴³ Dede Rosyada, Paradigma Pendidikan Demokratis, Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan (Jakarta: Prenada Media, 2004) , h. 26

⁴⁴ Syafruddin Nurdin dan Basyiruddin Usman, Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 34

Oleh sebab itu, kurikulum adalah rancangan yang lebih ideal dan kurikulum yang mengintegrasikan antara kurikulum yang bersifat tertulis dan kurikulum sebagaimana yang dilaksanakan dan dipelajari serta mencakup juga hidden kurikulum yang mendukung pengembangan siswa mencetak kebiasaan terhadap siswa⁴⁵. Menurut Sukmadinata, kurikulum sebagai suatu hal pokok dari proses pendidikan formal yang memiliki beberapa kegiatan yang saling berhubungan. Kegiatan tersebut meliputi penyusunan desain kurikulum, perencanaan, implementasi, dan pengembangan kurikulum yang meliputi kegiatan evaluasi dan penyempurnaan⁴⁶.

Berdasarkan pengertian kurikulum secara umum menurut Undang-undang sistem pendidikan nasional dan pengertian kurikulum menurut definisi para ahli dapat disimpulkan bahwa dari penjelasan tersebut diatas tentang pengertian kurikulum sangatlah mendasar dan menggambarkan fungsi kurikulum yang sesungguhnya dalam sebuah proses pendidikan.

c. Teori Pengembangan Kurikulum Terintegrasi

Kurikulum terintegrasi (*integrated curriculum*) lebih memandang bahwa dalam suatu pokok bahasan harus *integrated* atau terpadu secara menyeluruh. Keterpaduan ini dapat dicapai melalui pemusatan pelajaran pada satu masalah tertentu dengan alternatif pemecahan melalui berbagai disiplin ilmu atau mata pelajaran yang diperlukan sehingga batas-batas antara mata pelajaran dapat diabaikan. Keberadaan proses pembelajaran tidak terfokus pada mempelajari mata pelajaran-mata pelajaran, melainkan mata pelajaran-mata pelajaran itu hanya dijadikan sarana untuk mendekati permasalahan yang menjadi fokus kajian.

⁴⁵ Dede Rosyada, Paradigma Pendidikan Demokratis (Jakarta: Kencana, 2007), 33.

⁴⁶ Nana Saodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum, Teori Dan Praktik (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 23.

Hal ini dapat memungkinkan setiap peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing, dan secara psikologis dapat menjadi sarana pengembangan pribadi yang utuh. (Muhammad Ali, 2009: 58). Pengembangan kurikulum terintegrasi memberikan kesempatan pada peserta didik untuk belajar secara kelompok maupun secara individu, lebih memberdayakan masyarakat sebagai sumber belajar, memungkinkan pembelajaran bersifat individu terpenuhi, serta dapat melibatkan peserta didik dalam kurikulum ini akan bermanfaat secara fungsional serta dalam pembelajaran akan dapat membentuk kemampuan peserta didik. Kurikulum ini juga mempertimbangkan semua aspek, sesuai dengan sistem kepercayaan, sistem nilai, sistem kebutuhan yang terpadu dalam Masyarakat.

Pelaksanaan kurikulum direalisasikan dalam proses belajar mengajar sesuai dengan prinsip-prinsip dan tuntutan kurikulum yang telah dikembangkan bagi suatu jenjang pendidikan atau sekolah tertentu. Kegiatan proses belajar mengajar erat kaitannya dengan tugas-tugas seorang guru, kegiatan-kegiatan tersebut antara lain: (a) menyusun rencana pelaksanaan program/unit, (b) menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan dan jadwal pelajaran, (c) pengisian daftar penilaian kemajuan belajar dan perkembangan peserta didik, dan (d) pengisian buku laporan pribadi peserta didik. Dalam pendekatan pelaksanaan kurikulum terintegrasi, peserta didik adalah pembuat keputusan dan para pemecah masalah.

Proses dipandang sebagai sentral untuk menjelaskan tingkah laku. Peserta didik itu berbeda satu sama lain, sedangkan masalah merupakan kunci dimana proses dimulai, karena itu pula cara penyelesaian masalah pun berbeda satu sama lain, tidak ada dua cara yang sama. Para peserta didik bukan saja dikembangkan sebagai suatu kepribadian yang bulat, akan tetapi juga dipersiapkan sebagai pribadi yang mampu berperan di masyarakat.

Dalam pelaksanaan kurikulum ini guru dituntut untuk memiliki kemampuan mengimplementasikan berbagai strategi belajar mengajar yang sesuai dengan karakteristik kurikulum tersebut. Pembelajaran yang mungkin banyak digunakan seperti pemecahan masalah, metode proyek, pengajaran unit, *inquiry*, *discovery*, dan pendekatan tematik yang dilakukan dalam pembelajaran kelompok maupun secara perorangan. Pembelajaran tematik juga merupakan salah satu model dalam pembelajaran terpadu (*integrated instruction*) yang merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan peserta didik, baik secara individual maupun kelompok, aktif.

Pengembangan Kurikulum terintegrasi di sekolah menggalikan menemukan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan secara holistik, bermakna dan autentik. Pendekatan pembelajaran terpadu lebih menekankan pada penerapan konsep belajar sambil melakukan sesuatu (*learning by doing*). Peserta didik akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang telah dipahaminya. (Rusman, 2009: 254) Kurikulum terintegrasi terwujud pada unit-unit pembelajaran, yang masing-masing unit didukung oleh sejumlah mata pelajaran atau bidang studi.

Tiap unit merupakan suatu masalah yang luas dan perlu dipecahkan, dan pemecahannya membutuhkan bahan dari setiap bidang studi. Itu sebabnya, urutan bahan, ruang lingkup dan penempatan bahan untuk setiap unit harus dirancang berdasarkan kebutuhan unit dan sistem instruksional yang dilaksanakan. (Oemar Hamalik, 2008: 1). Integrasi-interkoneksi merupakan model integrasi ilmu yang dikembangkan oleh M. Amin Abdullah. Integrasi-interkoneksi adalah cara pandang terhadap ilmu yang terbuka dan menghormati keberadaan jenis-jenis ilmu lain dengan tidak meninggalkan sifat kritis⁴⁷.

⁴⁷ Waryani Fajar Riyanto, Integrasi-Interkoneksi Keilmuan: Biografi Intelektual M. Amin Abdullah

d. Teori Pembangunan Berkelanjutan

Berdasarkan *President's Council on Sustainable Development in the United States as* (USEPA, 2013), pembangunan yang berkelanjutan merupakan suatu proses perkembangan yang dapat meningkatkan tingkat perekonomian, menjaga kelestarian lingkungan, dan keadaan sosial untuk kebermanfaatan generasi sekarang dan generasi di masa depan. Menurut Budiharjo dan Sudjarto (2012) pengertian pembangunan berkelanjutan adalah kota yang dalam perkembangannya mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya masa kini, mampu berkompetisi dalam ekonomi global dengan mempertahankan keserasian lingkungan vitalitas sosial, budaya, politik, dan pertahanan keamanannya tanpa mengabaikan atau mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam pemenuhan kebutuhan mereka.

Aspek penting dari pembangunan berkelanjutan adalah penekanan proses partisipatif. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan tidak hanya diasumsikan sebagai suatu kebijakan yang lahir dari minoritas kecil teknokrat atau pembuat kebijakan, namun menekankan peran penting masyarakat dan kaum minoritas di dalamnya. Dengan demikian, bagian penting yang menjadi penekanan dalam menciptakan pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana menyertakan beragam pemangku kepentingan dalam penentuan apa yang perlu dilakukan dan bagaimana melakukannya⁴⁸.

e. Teori Strategi

Teori strategi adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami bagaimana organisasi atau individu merencanakan, mengintegrasikan, dan melaksanakan langkah-langkah untuk mencapai tujuan mereka dalam lingkungan yang kompleks dan berubah. Ini mencakup berbagai pendekatan, konsep, dan metode yang membantu dalam pengambilan keputusan strategis⁴⁹.

(Yogyakarta: Suka Press, 2013), 715

⁴⁸ https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/buku_lintas_tim/buku-lintas-tim-public-18.pdf

⁴⁹ <https://eprints.uny.ac.id/8632/3/BAB%202%20-%2008417141011.pdf>

11. Lingkungan Strategis

a. Faktor Global

Pengaruh lingkungan strategis global terhadap kebijakan ekonomi hijau di Indonesia sangat signifikan. Lingkungan strategis global mencakup berbagai faktor, antara lain; tren internasional, kerja sama regional, perjanjian internasional, dan dinamika geopolitik.

Sebagai negara dengan jumlah penduduk nomor 4 terbesar di dunia, Indonesia memiliki komitmen global yang kuat untuk ikut mengatasi isu perubahan iklim dan mendorong ekonomi hijau. Beberapa bentuk komitmen tersebut antara lain: Indonesia ikut berpartisipasi dalam perjanjian Paris. Indonesia adalah salah satu negara yang telah meratifikasi Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim. Dengan demikian, Indonesia berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam mengurangi emisi gas rumah kaca.

Sebagai bagian dari komitmen global, Indonesia telah menyetujui perjanjian Internasional. Indonesia telah berkomitmen untuk mematuhi perjanjian internasional yang berkaitan dengan lingkungan dan perubahan iklim. Komitmen ini mempengaruhi pembuatan kebijakan ekonomi hijau, karena Indonesia harus mematuhi target dan kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut. Persaingan di pasar internasional semakin mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktik-produksi yang ramah lingkungan.

Kebijakan ekonomi hijau di Indonesia dapat membantu meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia di pasar global dengan mempromosikan standar lingkungan yang tinggi. Tekanan publik dan aktivis lingkungan di tingkat global juga dapat memengaruhi kebijakan ekonomi hijau di Indonesia. Pemerintah Indonesia mungkin merespons tuntutan masyarakat untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam melindungi lingkungan dan mengatasi perubahan iklim.

b. Regional

Pengaruh lingkungan strategis regional di Kawasan ASEAN terhadap kebijakan ekonomi hijau di Indonesia cukup signifikan. Sebagai salah satu negara anggota ASEAN yang memiliki peran besar dalam kawasan tersebut, Indonesia dipengaruhi oleh dinamika dan kebijakan ASEAN dalam berbagai hal, termasuk isu lingkungan dan ekonomi hijau. Berikut adalah beberapa situasi di mana lingkungan strategis regional di ASEAN memengaruhi kebijakan ekonomi hijau di Indonesia. Negara-negara di kawasan ASEAN telah mengadopsi berbagai inisiatif dan program untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan di kawasan tersebut. Indonesia dapat mengambil manfaat dari kerja sama ini dalam mengembangkan kebijakan ekonomi hijau dan memperkuat upaya bersama untuk mengatasi tantangan lingkungan di kawasan. ASEAN memiliki forum untuk membahas harmonisasi kebijakan lingkungan, termasuk kebijakan ekonomi hijau. Melalui proses ini, Indonesia dapat berpartisipasi dalam pembentukan standar dan pedoman bersama yang mendukung transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan di tingkat regional.

ASEAN menyediakan platform untuk pertukaran pengetahuan dan teknologi antara negara-negara anggotanya dalam berbagai bidang, termasuk teknologi hijau dan praktik-praktik terbaik dalam pembangunan berkelanjutan. Indonesia dapat memanfaatkan ini untuk mempercepat implementasi kebijakan ekonomi hijau dan meningkatkan kapasitas dalam bidang ini. Dengan lebih dari 600 juta penduduk dan ekonomi yang terus berkembang, ASEAN merupakan pasar yang penting bagi produk-produk ramah lingkungan. Kebijakan ekonomi hijau di Indonesia dapat memanfaatkan pasar regional ini dengan mempromosikan produk-produk yang berkelanjutan dan memenuhi standar lingkungan yang diakui di kawasan ASEAN.

Dalam menghadapi tantangan lingkungan yang kompleks, solidaritas dan kolaborasi antara negara-negara ASEAN sangat penting. Sehingga dengan memperhatikan pengaruh lingkungan strategis regional di ASEAN, Indonesia dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi hijau dalam kebijakan nasionalnya dan berkontribusi secara positif terhadap pembangunan berkelanjutan di tingkat regional.

c. Nasional

1) Ideologi

Pengaruh lingkungan strategis ideologi Pancasila memiliki dampak yang signifikan terhadap kebijakan integrasi ekonomi hijau dan kurikulum pendidikan dalam konteks pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Ideologi Pancasila mendorong pendekatan pembangunan yang holistik, mempertimbangkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Ini dapat mempengaruhi kebijakan integrasi ekonomi hijau dengan mendorong strategi pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dalam konteks ekonomi hijau, ini bisa berarti mendukung inisiatif lokal dan partisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan serta pengembangan teknologi hijau.

Kurikulum pendidikan yang berbasis Pancasila dapat mengintegrasikan nilai-nilai lingkungan dan keberlanjutan sebagai bagian dari pendidikan moral dan etika yang ditanamkan pada siswa. Pancasila menekankan pentingnya karakter dan kewarganegaraan yang baik, termasuk dalam hal kesadaran akan lingkungan dan tanggung jawab terhadap generasi masa depan. Kurikulum berbasis Pancasila mendorong pendidikan yang membangun kemampuan berpikir kritis, partisipatif, dan kreatif, yang penting dalam menghadapi tantangan pembangunan berkelanjutan.

Dengan demikian, pengaruh lingkungan strategis, termasuk kondisi ideologi Pancasila memainkan peran krusial dalam membentuk kebijakan dan kurikulum yang mendukung integrasi ekonomi hijau dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

2) Politik

Pengaruh lingkungan strategis nasional, termasuk kondisi politik, memiliki dampak penting terhadap integrasi ekonomi hijau ke dalam kurikulum pendidikan guna mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Kebijakan dan program pemerintah berperan penting dalam mendorong integrasi ekonomi hijau ke dalam kurikulum pendidikan. Melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan, pemerintah dapat mempromosikan inklusi materi tentang ekonomi hijau dalam kurikulum pendidikan nasional. Komitmen politik yang kuat terhadap pembangunan berkelanjutan membantu memperkuat dukungan terhadap integrasi ekonomi hijau ke dalam kurikulum pendidikan. Para pemimpin politik yang memprioritaskan isu lingkungan dan keberlanjutan akan mendorong penyelarasan program pendidikan dengan tujuan-tujuan tersebut.

Adopsi undang-undang dan regulasi lingkungan yang kuat juga dapat memperkuat integrasi ekonomi hijau ke dalam kurikulum pendidikan. Hukum yang mengamanatkan pendidikan lingkungan sebagai bagian integral dari kurikulum sekolah dapat memberikan dasar hukum yang kuat untuk integrasi tersebut. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pembuatan kebijakan pendidikan, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, industri, dan masyarakat sipil, akan memperkuat dukungan dan implementasi integrasi ekonomi hijau ke dalam kurikulum pendidikan.

Opini publik yang mendukung pembangunan berkelanjutan dapat mempengaruhi agenda politik dan pendidikan. Media massa dan komunikasi publik memainkan peran penting dalam membentuk kesadaran masyarakat tentang isu-isu lingkungan, termasuk integrasi ekonomi hijau ke dalam kurikulum pendidikan. Dengan memperhitungkan kondisi politik yang ada, integrasi ekonomi hijau ke dalam kurikulum pendidikan dapat didukung dan diperkuat, sehingga menjadi bagian integral dari upaya pemerintah dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan.

3) **Ekonomi**

Pengaruh lingkungan strategis nasional, khususnya kondisi ekonomi, memiliki dampak yang signifikan terhadap integrasi ekonomi hijau ke dalam kurikulum pendidikan guna mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Integrasi ekonomi hijau ke dalam kurikulum pendidikan dapat mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengembangkan dan menerapkan teknologi hijau serta praktik-produksi yang ramah lingkungan.

Keterlibatan ekonomi hijau dalam kurikulum pendidikan dapat mempersiapkan siswa dengan keterampilan yang diperlukan untuk bekerja di sektor-sektor ekonomi hijau yang berkembang. Ini mencakup keterampilan dalam teknologi terbarukan, manajemen sumber daya alam, dan perencanaan pembangunan berkelanjutan. Integrasi ekonomi hijau ke dalam kurikulum pendidikan juga dapat mempromosikan inovasi dan daya saing ekonomi. Dengan memberikan pemahaman tentang kebutuhan dan peluang dalam ekonomi hijau, kurikulum pendidikan dapat mendorong generasi muda untuk menciptakan solusi-solusi baru yang berkelanjutan dan meningkatkan kompetitivitas Indonesia di pasar global.

4) **Sosial Budaya**

Pengaruh lingkungan strategis nasional, khususnya kondisi sosial budaya, memiliki dampak yang penting terhadap integrasi ekonomi hijau ke dalam kurikulum pendidikan guna mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Budaya Indonesia kaya akan nilai-nilai lingkungan dan keberlanjutan yang terwujud dalam kearifan lokal, tradisi adat, dan nilai-nilai agama. Integrasi ekonomi hijau ke dalam kurikulum pendidikan dapat memperkuat pemahaman tentang nilai-nilai ini dan mendorong siswa untuk mengapresiasi dan menerapkan praktik-produksi yang ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Kurikulum pendidikan dapat mempromosikan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi hijau dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya alam, dan implementasi solusi-solusi berkelanjutan.

5) **Pertahanan dan Keamanan**

Lingkungan yang sehat dan berkelanjutan menjadi faktor penting dalam menciptakan stabilitas sosial dan keamanan nasional. Integrasi ekonomi hijau ke dalam kurikulum pendidikan dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang keterkaitan antara lingkungan yang sehat dan keamanan nasional, serta memperkuat kesadaran akan pentingnya menjaga keberlangsungan sumber daya alam untuk kepentingan nasional. Perubahan lingkungan, seperti perubahan iklim, kehilangan biodiversitas, dan kerusakan ekosistem, dapat meningkatkan risiko konflik dan krisis. Integrasi ekonomi hijau ke dalam kurikulum pendidikan dapat membantu siswa memahami dampak lingkungan terhadap stabilitas sosial dan keamanan, serta mendorong mereka untuk mencari solusi berkelanjutan untuk mengatasi tantangan.

Dengan mengintegrasikan ekonomi hijau ke dalam kurikulum pendidikan, siswa dapat memahami pentingnya diversifikasi ekonomi dan pengurangan ketergantungan pada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan nasional.

(6) Geografi

Kondisi geografi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Beberapa aspek dari kondisi geografis Indonesia yang mempengaruhi kebijakan ekonomi hijau meliputi: Indonesia memiliki keanekaragaman alam yang luar biasa, termasuk hutan hujan tropis, lahan gambut, dan keanekaragaman hayati yang tinggi. Kebijakan ekonomi hijau harus memperhitungkan perlindungan dan pengelolaan berkelanjutan terhadap sumber daya alam ini, termasuk pengendalian deforestasi, restorasi lahan gambut, dan konservasi biodiversitas.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia rentan terhadap dampak perubahan iklim seperti kenaikan permukaan air laut, cuaca ekstrem, dan peningkatan risiko bencana alam. Kebijakan ekonomi hijau harus mengintegrasikan strategi adaptasi perubahan iklim, termasuk infrastruktur tahan iklim, pengembangan pertanian yang tangguh iklim, dan pengurangan risiko bencana. Pulau-pulau kecil Indonesia sering menghadapi tantangan unik dalam hal akses sumber daya dan layanan. Kebijakan ekonomi hijau harus memperhitungkan kebutuhan khusus dari pulau-pulau kecil ini, termasuk promosi energi terbarukan berbasis lokal, manajemen limbah yang berkelanjutan, dan transportasi ramah lingkungan. Indonesia memiliki potensi besar dalam sumber energi terbarukan seperti energi panas bumi, tenaga surya, dan angin.

Kebijakan ekonomi hijau harus memanfaatkan potensi ini dengan mempromosikan investasi dan pengembangan teknologi dalam sektor energi terbarukan, serta mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Dengan memperhatikan kondisi geografisnya yang unik, kebijakan ekonomi hijau di Indonesia harus dirancang secara khusus untuk mengatasi tantangan lingkungan yang spesifik dan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan energi terbarukan yang dimilikinya.

7) **Demografi**

Pengaruh lingkungan strategis nasional, termasuk kondisi demografi, terhadap integrasi ekonomi hijau ke dalam kurikulum pendidikan sangatlah penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Beberapa aspek kondisi demografi yang perlu dipertimbangkan dalam integrasi ekonomi hijau ke dalam kurikulum pendidikan mencakup:

Pertumbuhan penduduk yang cepat di Indonesia menunjukkan perlunya kesadaran akan pentingnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Integrasi ekonomi hijau ke dalam kurikulum pendidikan dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang bagaimana pertumbuhan penduduk memengaruhi lingkungan dan bagaimana cara mengelolanya secara berkelanjutan. Tingkat urbanisasi yang meningkat menghasilkan tekanan tambahan terhadap lingkungan, termasuk polusi udara, limbah, dan kepadatan penduduk. Kurikulum pendidikan perlu mencakup pemahaman tentang dampak urbanisasi terhadap lingkungan dan mendorong pemikiran kreatif untuk solusi berkelanjutan dalam perencanaan perkotaan. Tingkat pendidikan dan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat mempengaruhi penerimaan dan implementasi kebijakan ekonomi hijau.

Kurikulum pendidikan harus memasukkan materi yang memperkuat kesadaran lingkungan, mendorong perilaku yang berkelanjutan, dan memberikan keterampilan praktis untuk mengatasi tantangan lingkungan. Struktur usia penduduk Indonesia dapat mempengaruhi strategi pendidikan dan penyuluhan lingkungan. Materi tentang ekonomi hijau perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan minat dari berbagai kelompok usia, sehingga dapat merangsang minat dan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat.

Dengan memperhitungkan faktor-faktor demografis ini, integrasi ekonomi hijau ke dalam kurikulum pendidikan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

8) **Sumber Kekayaan Alam**

Pengaruh lingkungan strategis nasional, khususnya kondisi sumber daya alam, sangat penting dalam integrasi ekonomi hijau ke dalam kurikulum pendidikan guna mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, termasuk hutan hujan tropis, lahan gambut, dan keanekaragaman hayati yang tinggi. Integrasi ekonomi hijau ke dalam kurikulum pendidikan dapat mengajarkan pentingnya melestarikan dan menggunakan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi pembangunan masa depan.

Kurikulum pendidikan dapat memasukkan materi tentang pentingnya konservasi biodiversitas dan perlindungan spesies-spesies endemik. Ini akan membantu memperkuat kesadaran tentang nilai ekologis yang unik dari sumber daya alam Indonesia dan mendorong tindakan untuk melindunginya. Integrasi ekonomi hijau ke dalam kurikulum pendidikan juga harus mencakup inovasi teknologi hijau dalam pemanfaatan sumber daya alam.

BAB III PEMBAHASAN

12. Umum

Istilah 'Ekonomi Hijau' pertama kali muncul di Laporan "*Blueprint for a Green Economy*" tahun 1989 oleh David Pearce. Laporan tersebut ditulis sebagai kritik terhadap rendahnya penilaian biaya lingkungan dan sosial dalam sistem harga ekonomi⁵⁰. Pearce kemudian menulis artikel dalam jurnal *Environmental Values* tahun 1992 "*Green Economics*" dan mendefinisikan *Green Economy* sebagai berikut:

"A green economy is one that has the capability of replicating itself on a sustainable basis [...] the essential feature of the green economy is the systematic decoupling of rates of change in economic output and the environmental assets used up in that process. This green economy is therefore consistent with non-declining human welfare and with the sustainable use of natural resources."

Ekonomi hijau adalah ekonomi yang memiliki kemampuan untuk mereplikasi dirinya sendiri secara berkelanjutan. Fitur penting dari Ekonomi Hijau adalah pemisahan sistematis tingkat perubahan dalam output ekonomi dan aset lingkungan yang digunakan dalam proses itu. Oleh karena itu Ekonomi Hijau konsisten terhadap kesejahteraan manusia dan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan." Sejak itu, konsep Ekonomi Hijau telah diperluas.

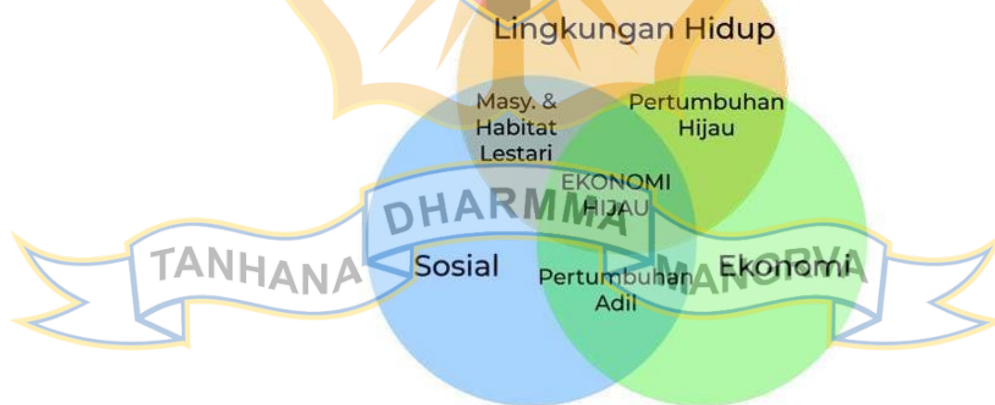
Ekonomi Hijau didefinisikan oleh *United Nations Environment Programme* (UNEP)⁵¹ sebagai salah satu hal yang mampu menghasilkan peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial (*well-being and social equity*) dan secara signifikan menurunkan risiko lingkungan serta kelangkaan ekologi (*environmental risks and ecological scarcities*). UNEP juga menekankan pemikiran pada pelestarian modal alam, yang meliputi ekosistem dan sumber daya alam. Dalam prakteknya, konsep ekonomi hijau Indonesia tentu akan merujuk kepada Pancasila dan UU 1945.

⁵⁰ Laura Loiseau, et al., "Green economy and related concepts: An overview," *Journal of Cleaner Production* 139 (2016): 361.

⁵¹ UNEP, "Green Economy: What Do We Can by Green Economy?" (Nairobi: UNEP, Mei 2012), 7.

Konsepsi ekonomi hijau memiliki relevansi yang nyata dengan Pancasila dan UU NRI 1945. Pada pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional⁵². Pasal 33 ayat 4 dari UUD 1945 sesungguhnya mengatur tentang ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan. Pasal ini merupakan dasar konstitusional yang mendukung implementasi konsep ekonomi hijau di Indonesia, yang bertujuan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan ekonomi nasional.

Dalam praktiknya, Ekonomi Hijau tidak terlepas dari pembangunan berkelanjutan. Kualitas lingkungan yang saat ini kian memburuk karena kegiatan industri, memunculkan perhatian lebih terhadap upaya menjaga keseimbangan antara kegiatan industri dengan kualitas lingkungan yang merupakan tujuan dari pembangunan berkelanjutan tersebut. Adapun pembangunan berkelanjutan terdiri dari tiga komponen, yakni: ekonomi, ekologi, dan sosial seperti ditunjukkan pada bagan di bawah ini.



Gambar. 1. 3 Komponen Pembangunan berkelanjutan⁵³

⁵²<https://kumparan.com/berita-hari-ini/isi-dan-makna-pasal-33-uud-1945-sebagai-landasan-perekonomian-bangsa-1vKHY9Y3QHd>

⁵³ Chris Greenwood et al., Heart of Borneo, A Natural Priority for A Green Economy, (Sabah: WWF, 2012),

Ketiga komponen pembangunan berkelanjutan saling terkait secara multidimensional. Pembangunan ekonomi sebuah negara, khususnya dalam negara berkembang, perlu mempertimbangkan ketiga komponen sebagaimana di atas. Komponen ekonomi harus mempertimbangkan dua komponen lainnya. Komponen lingkungan hidup menjaga agar kegiatan ekonomi tidak merusak lingkungan hidup⁵⁴. Sementara itu, komponen sosial mendorong kesejahteraan manusia yang berkeadilan. Maka dari itu, masa depan pembangunan berkelanjutan bergantung pada masyarakat yang sadar akan pentingnya keselarasan ketiga komponen pembangunan berkelanjutan di atas. Dalam hal ini, manusia adalah faktor penting untuk dikembangkan karena akan menentukan arah dan kelangsungan agenda pembangunan berkelanjutan.

Sejak diperkenalkan pada 1989, implementasi Ekonomi Hijau secara internasional terus berkembang hingga hari ini. Pada tahun 2008, Ekonomi Hijau mulai masuk arus utama agenda internasional, ditandai dengan pengadopsian ekonomi rendah karbon dan pertumbuhan hijau menjadi tujuan baru melalui *United Nations Environment Programme* (UNEP). Ekonomi Hijau semakin digaungkan sebagai solusi ketika terjadinya krisis keuangan 2008.

Walaupun belum terdapat konsensus global mengenai definisi Ekonomi Hijau, Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menggunakan definisi Ekonomi Hijau yang diadaptasi dari UNEP, yaitu sebuah model pembangunan ekonomi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang fokus pada investasi, modal, infrastruktur, pekerjaan, dan keterampilan untuk mencapai kesejahteraan sosial dan lingkungan berkelanjutan.⁵⁵

⁵⁴ Dan Duran et al., "The Components of Sustainable Development - A Possible Approach," *Procedia Economics and Finance* 26 (2015): 806-811.

⁵⁵ Bappenas, *Green Economy Index: A Step Forward to Measure the Progress of Low Carbon and Green Economy in Indonesia*, (Jakarta: Bappenas, 2022), 10.

Dengan demikian, Ekonomi Hijau di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus memprioritaskan kelestarian lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat. Inisiatif implementasi Ekonomi Hijau di Indonesia sudah dimulai sejak 2013 melalui kerja sama Bappenas dengan *Global Green Growth Institute* (GGGI) yang bernama *Green Growth Program* (GGP) Indonesia.⁵⁶

GGP memiliki tiga sektor prioritas, yaitu energi berkelanjutan, lanskap berkelanjutan, dan infrastruktur berkelanjutan. Peranan seluruh aktor dalam GGP disorot sebagai kunci keberhasilan pertumbuhan Ekonomi Hijau. Dalam rangka mewujudkan gerakan ekonomi hijau di Indonesia guna mendorong pembangunan yang berkelanjutan, Indonesia memiliki instrumen kebijakan yang menjadi dasar implementasi roadmap atau peta jalan ekonomi hijau yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia (Bappenas) dan *Global Green Growth Institute Program*⁵⁷.

Setidaknya ada beberapa peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dan menjadi landasan operasional dan dasar dalam penerapan ekonomi hijau yaitu UU No. 17 tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2021 dan RPJMN 2020-2024, dimana dalam RPJMN ini terdapat strategi pembangunan rendah karbon yang mendukung ekonomi hijau. RPJMN adalah dokumen perencanaan untuk periode lima tahun sebagai penjabaran dari agenda pembangunan yang ditawarkan presiden pada saat kampanye kedalam rencana pembangunan jangka menengah⁵⁸. Dan ini juga tentu memiliki korelasi dengan sistem perencanaan pembangunan nasional seperti yang tertuang dalam UU RI No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

⁵⁶ Bappenas, "Indonesia Green Growth Program," Bappenas, dirilis pada 1 September 2016, <http://greengrowth.bappenas.go.id/gggi-indonesia-gulirkan-fase-ii-guna-dorong-pertumbuhan-investasi-hijau-2/>.

⁵⁷ Bepenas-GGGI Program, Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau: Peta Jalan Untuk kebijakan, Perencanaan, dan investasi, 2013, Diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia-GGGI Program

⁵⁸ Dadang Solihin. Radjab Semendawai. (2013). Optimalisasi Otonomi daerah, Kebijakan, Strategi, dan Upaya. Yayasan Empat Sembilan Indonesia. Hal 19.

Tujuan instrumen kebijakan yang menjadi dasar implementasi roadmap atau peta jalan ekonomi hijau yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia (Bapenas) dan *Global Green Growth Institute Program* adalah mengurangi emisi karbon dan memperkuat sektor-sektor ekonomi berkelanjutan⁵⁹. Selain itu ada juga UU Cipta Kerja, dimana UU ini didalamnya mengatur tentang pembaharuan arah pembangunan ekonomi hijau, termasuk dalam sektor lingkungan hidup dan kehuatanan. Beberapa peraturan yang disempurnakan dengan dikeluarkannya UU cipta Kerja meliputi UU 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, UU 41/1999 tentang kehutanan, dan UU nomor 18/2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan⁶⁰. Ekonomi hijau masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Ada tiga program prioritas untuk mencapai ekonomi hijau:

1. Peningkatan kualitas lingkungan: program ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi lingkungan, termasuk pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup.
2. Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim: fokus pada mengurangi risiko bencana dan mengatasi dampak perubahan iklim. Ini melibatkan upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan ketahanan terhadap bencana alam.
3. Pembangunan rendah karbon: program ini berusaha mengurangi jejak karbon dan mendorong penggunaan energi bersih serta teknologi ramah lingkungan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024 diatur dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020. RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode lima tahun, mulai dari tahun 2020 hingga 2024.

⁵⁹<https://ekon.go.id/publikasi/detail/3917/ekonomi-hijau-dan-pembangunan-rendah-karbon-mendorong-pertumbuhan-ekonomi-dan-meningkatkan-kesejahteraan-sosial>

⁶⁰<https://nasional.tempo.co/read/1537156/uu-cipta-kerja-sempurnakan-arah-pembangunan-ekonomi-hijau>

Dokumen ini memuat berbagai strategi dan program yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Jadi Perpres No. 18 Tahun 2020 merupakan rujukan bagi penerapan konsep ekonomi hijau di Indonesia. Dalam RPJM Nasional ini, terdapat langkah-langkah untuk memperbaiki kondisi lingkungan, meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim, serta mengembangkan sektor-sektor berkelanjutan yang mengurangi emisi karbon⁶¹. Ekonomi hijau adalah konsep pembangunan yang menggabungkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan.

Pada dasarnya dalam implementasi ekonomi hijau terdapat beberapa prinsip guna mendukung penerapan ekonomi hijau⁶². Pertama prinsip berkelanjutan: ekonomi hijau bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ini berarti memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi mendatang. Kedua prinsip kesejahteraan: Ekonomi hijau memungkinkan semua orang untuk mewujudkan dan menikmati kesejahteraan. Ini mencakup aspek sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Kemudian ketiga prinsip keadilan: ekonomi hijau mempromosikan kesetaraan di antara generasi saat ini dan mendatang. Dengan dukungan pemetaan sosial dan ekonomi, prinsip ini berfokus pada keadilan dalam distribusi manfaat ekonomi hijau. Keempat prinsip inklusi yaitu ekonomi hijau harus bersifat inklusif dan partisipatif dalam pengambilan keputusan. Ini memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi hijau. Konsep integrasi ekonomi hijau dan kurikulum Pendidikan guna mendorong Pembangunan berkelanjutan adalah langkah yang sejalan dengan pencapaian visi Indonesia emas 2045. Dalam buku Navigasi Kepemimpinan Menuju Indonesia Emas 2045. Dr, Dadang Solihin, SE, MA. menyebutkan bahwa Indonesia Emas 2045 merupakan tujuan kolektif bagi Masyarakat Indonesia.

⁶¹<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/dari-istana/presiden-teken-perpres-no-18-2020-tentang-rpjm-nasional-tahun-2020-2024>

⁶²<https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/pengertian-ekonomi-hijau-macam-macam-konsep-dan-perannya/>

Visi Indonesia 2045 merupakan pandangan jauh kedepan yang memvisualisasikan Indonesia sebagai negara yang kuat, maju, dan berkelanjutan pada tahun 2045⁶³. Keterlibatan masyarakat memainkan peran kunci dalam menerapkan konsep ekonomi hijau. Oleh karena itu masyarakat perlu diberikan pemahaman akan pentingnya ekonomi hijau dan dampaknya terhadap lingkungan. Pendidikan dan kesadaran akan membantu mereka mengambil tindakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Berikutnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan memastikan bahwa kebijakan dan program yang diterapkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka. Ini juga memperkuat legitimasi kebijakan. Masyarakat juga dapat berkontribusi dengan mengadopsi praktik berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan memilah sampah. Ini berdampak positif pada lingkungan dan ekonomi. Keterlibatan Masyarakat juga bisa mendorong inovasi dan kewirausahaan. Dengan melibatkan masyarakat, kita dapat menciptakan perubahan positif menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Karena itu peran dan keterlibatan masyarakat harus dibentuk lewat berbagai sektor, salah satu sektor yang penting adalah pendidikan.

Integrasi ekonomi hijau dalam kurikulum pendidikan merupakan langkah penting untuk memastikan generasi muda memahami dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Secara teoritis upaya integrasi itu bisa dilakukan dengan memadukan materi lingkungan dan ekonomi kedalam kurikulum pendidikan formal, mendorong kreatifitas dan eksplorasi siswa dengan mengadopsi pendekatan kurikulum Merdeka, pengembangan *green skill*, pengenalan konsep ekonomi hijau didunia pendidikan dan memasukan isu lingkungan dan ekonomi kedalam kegiatan ekstra kurikuler atau unit kegiatan mahasiswa di kampus⁶⁴.

⁶³ Dadang Solihin.(2024).Navigasi Kepemimpinan : Menuju Indonesia Emas 2045. PT Penerbit IPB Press. hal. 23.

⁶⁴<https://mediaindonesia.com/humaniora/481481/pentingnya-integrasi-kemampuan-wirausaha-dalam-kurikulum-pendidikan-indonesia>

Berkaitan dengan kondisi umum di atas dalam Bab ini akan dibahas tentang analisis-analisis dari pertanyaan kajian yang mengacu pada data dan fakta yang diperoleh, serta teori-teori yang dicantumkan di bab sebelumnya. Kemudian selanjutnya, guna memahami secara komprehensif dan integral anatomi permasalahan integrasi ekonomi hijau dan kurikulum pendidikan guna mendorong pembangunan berkelanjutan. Pembahasan pada bab ini akan didahului dengan analisa SWOT, PESTLE dan Analisa Dynamic Governance guna memberikan gambaran terkait Integrasi ekonomi hijau dan kurikulum pendidikan guna mendorong pembangunan berkelanjutan. Pada tahap akhir akan dirumuskan strategi integrasi ekonomi hijau dan kurikulum pendidikan.

Sebelum melakukan pembahasan dan menganalisa berbagai aspek yang mempengaruhi integrasi ekonomi hijau dan kurikulum pendidikan guna mendorong pembangunan yang berkelanjutan, terlebih dahulu perlu dilakukan pemaparan sejumlah regulasi dan produk hukum yang dapat menjadi landasan hukum, kemudian beberapa data-data dan fakta yang berkaitan dengan tema yang diangkat, sejumlah teori yang bisa menjadi landasan berpikir serta melihat sejumlah faktor yang berpengaruh terhadap pemecahan masalah.

Berikut adalah matriks dokumentasi regulasi yang digunakan :

Tabel. 1. Matriks dokumentasi Regulasi

No	Jenis Regulasi	Digunakan Untuk
1	UUD 1945 Pasal 33 ayat (4) menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional	UU NRI Tahun 1945 merupakan sumber dasar hukum serta sumber motivasi dan aspirasi perjuangan serta tekad bangsa Indonesia. Dan dalam taskap ini digunakan sebagai Landasan Konstitusional Tentang ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan
3	UU No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025	UU ini digunakan sebagai pedoman yang menguraikan arah dan tujuan pembangunan jangka panjang di Indonesia.

4	UU No. 32 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Undang-undang ini digunakan sebagai landasan operasional dalam isu-isu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dimana ekonomi hijau dan isu lingkungan hidup memiliki korelasi yang signifikan.
5	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	UU ini menjadi rujukan dalam membahas penyelenggaraan pendidikan dan kurikulum pendidikan
6	UU No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas konvensi kerangka kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan iklim)	UU ini digunakan sebagai landasan operasional bagi upaya penyelesaian isu perubahan iklim ,pembangunan berkelanjutan, dan isu perlindungan lingkungan.
7	UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi	Undang-undang ini menjadi rujukan dalam membahas berbagai aspek terkait pendidikan tinggi di Indonesia, termasuk pengaturan tentang lembaga pendidikan tinggi, pengelolaan pendidikan tinggi, standar pendidikan tinggi, akreditasi, dan hal-hal lain.
11	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum	Peraturan ini menjadi pedoman memberikan pedoman penyusunan dan pengelolaan kurikulum, dalam peraturan ini, terdapat ruang untuk mengintegrasikan muatan kegiatan ekstrakurikuler, dan evaluasi kurikulum yang relevan dengan isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
12	Peraturan Presiden (Perpres Nomor 111. Tahun 2022, tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.	Perpres ini menjadi sumber bagi penjabaran dan penjelasan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
13	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024	Perpres ini menjadi rujukan dalam dalam penjabaran hubungan RPJMN dengan isu ekonomi hijau.

13. **Analisa SWOT Pada Integrasi Ekonomi Hijau dan Kurikulum Pendidikan Guna Mendorong Pembangunan Berkelanjutan**

13.1. **Analisa SWOT**

Analisis SWOT adalah cara yang didesain untuk membantu sebuah organisasi dan entitas bisnis dalam mempelajari dan mengevaluasi variabel-variabel internal dan eksternal yang memiliki potensi mempengaruhi keberhasilan organisasi atau perusahaan. Menurut Rangkuty (2015), analisis SWOT berdasar pada prinsip logika yang memungkinkan sebuah organisasi untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang mereka, sementara disisi lain berupaya untuk meminimalkan kelemahan dan ancaman. Atau dapat dikatakan bahwa, analisa SWOT membantu perusahaan untuk menggunakan kekuatan dan peluang mereka sebaik mungkin, sambil berusaha untuk memitigasi kelemahan dan ancaman yang mungkin menghambat kesuksesan mereka⁶⁵.

Analisa SWOT menurut Dadang Solihin dalam buku Optimalisasi Otonomi Daerah: Kebijakan, Strategi, dan Upaya, disebutkan bahwa analisa SWOT adalah suatu proses merinci keadaan lingkungan internal dan eksternal guna mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan organisasi kedalam kategori Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats, sebagai dasar untuk menentukan tujuan dan sasaran serta strategi untuk pencapaiannya⁶⁶. Aspek yang akan di ukur terhadap semua variabel yang dipilih adalah nilai urgensi (NU) berdasarkan skala likert dan Bobot Faktor (BF) berdasarkan presentase. Skala Likert adalah metode yang digunakan untuk mengukur sikap atau pendapat responden terhadap suatu pernyataan atau peristiwa. Skala ini dinamai dari psikolog Amerika Rensis Likert yang pertama kali mengusulkannya pada tahun 1932⁶⁷. Skala Likert sering digunakan dalam survei, penelitian ilmiah, dan dalam berbagai bidang sosial dan perilaku untuk mengumpulkan data tentang sikap, persepsi, atau preferensi. Cara Menggunakan Skala Likert:

⁶⁵ Rangkuty, Freddy. (2013). Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT Cara Perhitungan Bobot, Rating, dan OCAI. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.

⁶⁶ Dadang Solihin. Radjab Semendawai. (2013). Optimalisasi Otonomi daerah, Kebijakan, Strategi, dan Upaya. Yayasan Empat Sembilan Indonesia. Hal 19.

⁶⁷ <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/pengertian-skala-likert-cara-penggunaan-dan-contoh/>

1. Penyusunan Pernyataan: Pertama-tama, identifikasi aspek atau variabel yang ingin diukur. Buatlah pernyataan-pernyataan yang relevan dan dapat dipahami oleh responden. Pernyataan-pernyataan ini haruslah jelas dan tidak ambigu. Skala Likert dapat menggunakan skala numerik, misalnya dari 1 hingga 5
2. Pilihan Jawaban: Setiap pernyataan akan diikuti dengan skala yang terdiri dari beberapa pilihan jawaban yang dapat diukur. Penilaian dilakukan secara kualitatif yang dikuantitatifkan. (1). Buruk, (2). Kurang, (3). Cukup, (4). Baik, (5). Sangat Baik. Skala Likert dapat menggunakan skala numerik, misalnya dari 1 hingga 5 di mana 1 mewakili tingkat kepercayaan atau sikap yang paling rendah dan 5 mewakili tingkat tertinggi.
3. Distribusi Pernyataan: Susun pernyataan-pernyataan tersebut dalam urutan yang logis dan sesuai dengan tujuan penelitian atau survei Anda. Pastikan pernyataan yang lebih positif atau lebih setuju tidak hanya berada di satu ujung skala, tetapi tersebar secara merata di seluruh skala.
 Dengan memperhatikan langkah-langkah ini, Anda dapat mengimplementasikan skala Likert dengan efektif untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang sikap dan pendapat responden terkait dengan topik yang diteliti atau disurvei. Istilah SWOT sendiri sebenarnya adalah singkatan yang merujuk ke kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weaknesses*), peluang (*Opportunities*), dan ancaman (*Threats*) yang dihadapi oleh sebuah entitas organisasi/perusahaan. Pearce & Robinson (2014) menyatakan bahwa strategi yang efektif biasanya hadir dari keseimbangan antara sumber daya dan kapabilitas internal perusahaan dengan situasi eksternal atau lingkungan di mana perusahaan itu beroperasi⁶⁸. Teori ini dapat digunakan untuk menganalisa bagaimana integrasi ekonomi hijau dan kurikulum pendidikan guna mendorong pembangunan berkelanjutan, dengan melihat kekuatan dan peluang yang ada serta sejumlah upaya untuk mengantisipasi dan sedapat mungkin meminimalisir hambatan dan ancaman yang ada.

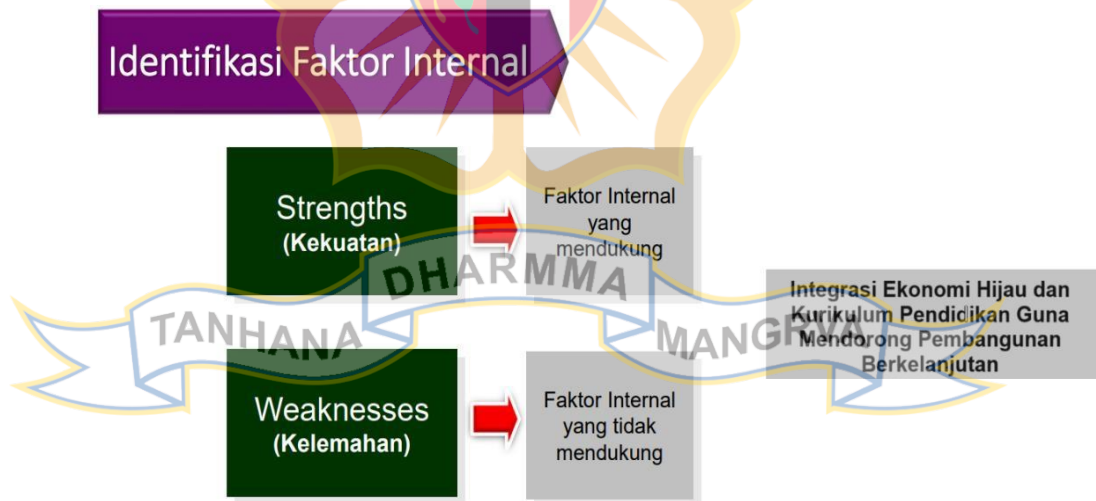
⁶⁸<https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/08/150000569/manajemen-strategi--definisi-para-ahli-dan-tugasnya>

13. 2. Matriks Analisa SWOT

INTERNAL EKSTERNAL	Strengths (Kekuatan)	Weaknesses (Kelemahan)
	Strategi SO Gunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Strategi WO Atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang
Threats (Ancaman)	Strategi ST Gunakan kekuatan untuk menghindari atau mengatasi ancaman	Strategi WT Minimalkan kelemahan dan hindari ancaman

Gambar. 2. Analisis SWOT⁶⁹

13. 3. Identifikasi Faktor Internal



Gambar. 3. Identifikasi Faktor Internal⁷⁰

⁶⁹ Dadang Solihin, Analisis SWOT untuk Memenangkan Pertempuran, <https://www.slideshare.net/slideshow/swot-menwa/8735486>

⁷⁰ H Dadang Solihin, Dinamika Kehidupan Sosial Budaya Indonesia di Era Transformasi Digital dalam Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara, Jakarta, 2024, Slide 23

a. Variabel Strengths (Kekuatan)

Variabel kekuatan ini mencerminkan potensi positif yang dimiliki konsep integrasi ekonomi hijau dan kurikulum pendidikan guna mendorong pembangunan berkelanjutan

Tabel. 2. Matriks SWOT Variabel Strengths (kekuatan)⁷¹

No	Variabel	NU	BF	NUxBF
1	Kesadaran Lingkungan yang Meningkat: Masyarakat semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan dan pelestarian lingkungan, yang dapat mendukung integrasi ekonomi hijau dalam kurikulum pendidikan	4	20	80
2	Potensi Penghematan dan Efisiensi: Konsep ekonomi hijau dapat membantu menghasilkan solusi yang lebih efisien dan hemat sumber daya, yang pada gilirannya dapat memberikan manfaat ekonomi	4	20	80
3	Inovasi dan Kreativitas: Fokus pada keberlanjutan dapat mendorong inovasi dan kreativitas dalam pendekatan bisnis dan ekonomi, yang dapat diajarkan dan dikembangkan melalui kurikulum pendidikan	3	10	30
4	Kolaborasi Antar Disiplin Ilmu: Integrasi ekonomi hijau membutuhkan kolaborasi antara berbagai disiplin ilmu, yang dapat memperkaya pengalaman belajar siswa dan memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang isu-isu lingkungan dan ekonomi.	4	30	120
5	Konsep ekonomi hijau telah diajarkan di beberapa kampus dan sekolah, dan ini bisa menjadi contoh jika ingin dimasukkan ke dalam kurikulum	5	20	100
	Jumlah		100	410

b. Variabel Weaknesses (Kelemahan)

Variabel kelemahan ini mencerminkan potensi negative atau tantangan yang dihadapi dalam Upaya implementasi konsep integrasi ekonomi hijau dan kurikulum pendidikan guna mendorong pembangunan berkelanjutan. Sejumlah kelemahan yang ditemukan dalam integrasi ekonomi hijau dan kurikulum Pendidikan adalah:

⁷¹ <https://www.slideshare.net/slideshow/swot-menwa/8735486>

Tabel. 3. Matriks SWOT Variabel Weaknesses (kelemahan)

No	Variabel	NU	BF	NUxBF
1	Keterbatasan sumber daya: kurangnya sumber daya, baik dalam hal dana maupun tenaga pengajar yang terlatih, dapat menjadi hambatan untuk mengintegrasikan materi ekonomi hijau ke dalam kurikulum pendidikan	3	20	60
2	Kurangnya kesiapan tenaga pengajar: banyak tenaga pengajar mungkin belum memiliki pengetahuan atau keterampilan yang cukup dalam bidang ekonomi hijau untuk mengajar materi tersebut secara efektif	3	20	60
3	Tantangan administratif: integrasi kurikulum baru dapat melibatkan tantangan administratif, seperti penyesuaian kurikulum yang sudah ada atau mengatasi hambatan birokrasi institusi	4	20	80
4	Kurikulum yang padat: penambahan materi baru ke dalam kurikulum yang sudah padat bisa menyebabkan kurangnya waktu untuk mempelajari materi yang sudah ada atau menimbulkan kelelahan siswa dan guru	4	20	80
5	Kurangnya sumber daya: implementasi kurikulum baru memerlukan sumber daya tambahan seperti pelatihan guru, bahan ajar, dan infrastruktur yang memadai, yang mungkin tidak selalu tersedia.	4	20	80
	Jumlah		100	360

13. 4. Identifikasi Faktor Eksternal

Gambar. 4. Identifikasi Faktor Eksternal⁷²

⁷² H Dadang Solihin, *Dinamika kehidupan Sosial budaya Indonesia Di era transformasi digital dalam*

c. Variabel Opportunities (Peluang)

Variabel peluang ini mencerminkan potensi positif dari pengaruh global yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong konsep integrasi ekonomi hijau dan kurikulum pendidikan guna mendorong pembangunan berkelanjutan.

Tabel. 4. Matriks SWOT Variabel Opportunities (Peluang)

No	Variabel	NU	BF	NUxBF
1	Daya saing global: negara atau institusi pendidikan yang mengadopsi pendekatan ini dapat meningkatkan daya saing mereka dalam skenario global dengan menciptakan tenaga kerja yang terampil dan terlatih dalam praktik ekonomi hijau	4	10	40
2	Kemitraan dengan industri: kolaborasi dengan industri dan organisasi non-pemerintah dapat menyediakan kesempatan untuk memperkuat kurikulum pendidikan dengan memperkenalkan siswa pada aplikasi praktis dari konsep-konsep ekonomi hijau	3	30	90
3	Peningkatan inovasi dan penelitian: fokus pada ekonomi hijau dalam kurikulum pendidikan dapat mendorong inovasi dan penelitian dalam teknologi dan praktik yang mendukung pembangunan berkelanjutan, seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan penggunaan sumber daya secara efisien.	5	20	100
4	Peningkatan kesadaran dan pendidikan: integrasi kurikulum pendidikan dengan konsep ekonomi hijau dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman generasi muda tentang pentingnya pembangunan berkelanjutan dan praktik ekonomi yang ramah lingkungan	3	20	60
5	Peningkatan kepatuhan regulasi: dengan menekankan ekonomi hijau dalam kurikulum pendidikan, dapat ditingkatkan pemahaman tentang regulasi lingkungan dan mendorong kepatuhan terhadap standar lingkungan yang lebih ketat.	4	20	80
Jumlah			100	370

d. Variabel Threats (Ancaman)

Variabel ancaman ini mencerminkan tantangan eksternal yang dihadapi dalam implementasi konsep integrasi ekonomi hijau dan kurikulum pendidikan guna mendorong pembangunan berkelanjutan.

Tabel. 5. Matriks SWOT Variabel Threats (Ancaman)

No	Variabel	NU	BF	NUxBF
1	Perlawanan terhadap perubahan: tidak semua pihak mungkin akan mendukung perubahan dalam kurikulum untuk mengintegrasikan ekonomi hijau, terutama jika itu membutuhkan pengorbanan atau perubahan signifikan dalam cara berpikir atau beroperasi.	3	20	60
2	Kurangnya konsensus tentang konsep ekonomi hijau: konsep ekonomi hijau masih terus berkembang dan terkadang kontroversial. Kurangnya konsensus tentang apa yang sebenarnya melibatkan ekonomi hijau dapat menyulitkan pengembangan kurikulum yang kohesif dan efektif.	4	20	80
3	Ketergantungan pada model ekonomi konvensional: pendidikan yang terlalu didominasi oleh model ekonomi konvensional dapat menghambat integrasi konsep-konsep ekonomi hijau yang lebih berkelanjutan	4	10	40
4	Resistensi budaya: budaya yang mementingkan pertumbuhan ekonomi konvensional dan kurang peduli terhadap lingkungan dapat menjadi hambatan utama dalam mengadopsi pendekatan ekonomi hijau dalam pendidikan	3	20	60
5	Keterbatasan pemahaman dan keterampilan guru: guru yang tidak memahami konsep ekonomi hijau atau kurang memiliki keterampilan dalam pengajaran berkelanjutan dapat menjadi hambatan dalam efektivitas integrasi ini	5	30	150
	Jumlah		100	390

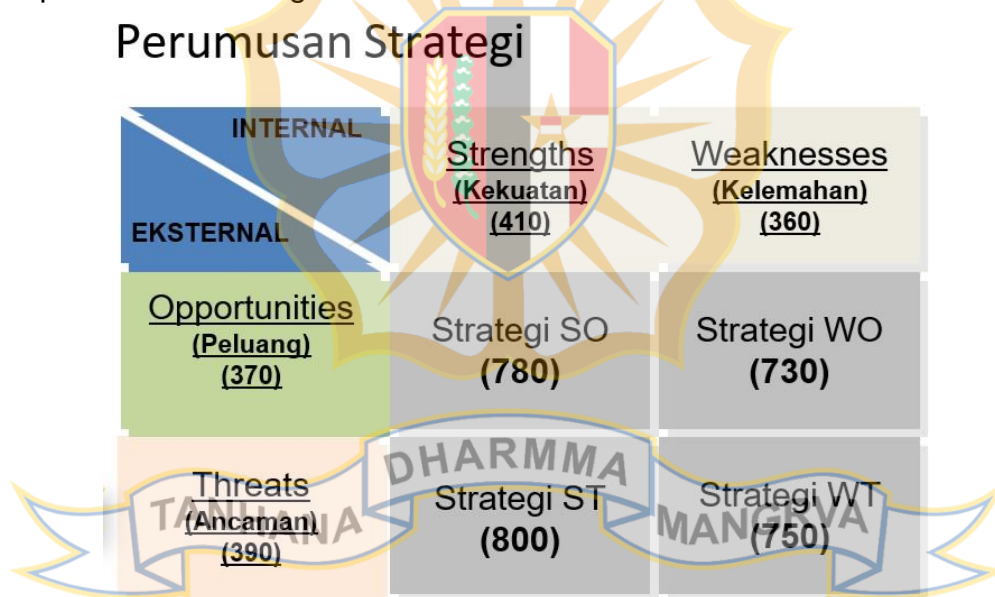
Rangkuti dalam penjelasannya, untuk merumuskan strategi yang tepat dapat digunakan matriks SWOT yang mengkombinasikan strategi yaitu :

- a. Strategi SO (*Strength and Opportunity*). Strategi ini merupakan salah satu upaya memaksimalkan kekuatan yang dimiliki agar bisa memanfaatkan peluang dengan sebesar-besarnya.
- b. Strategi ST (*Strength and Threat*). Strategi yang dibuat dengan mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki guna mengantisipasi dan mengatasi ancaman yang ada.
- c. Strategi WO (*Weakness and Opportunity*). Strategi ini merupakan upaya untuk diterapkan dengan mencoba memanfaatkan semua peluang dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.

- d. Strategi WT (*Weakness and Threath*). Strategi ini bersifat *defensive*, yang dilakukan dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

13. 5. Strategi Dan Kebijakan

- a. Strategi adalah pendekatan yang digunakan untuk menentukan pilihan keputusan dalam memperoleh kepekaan yang dihadapi organisasi terhadap kekuatan, kelemahan, tantangan, dan peluang. Kebijakan adalah langkah yang diambil dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan dari strategi yang dipilih⁷³.
- b. Matriks SWOT: merupakan model analisis yang dapat dipergunakan untuk merumuskan secara kreatif berbagai alternatif strategi yang dipilih. Strategi diperoleh dengan cara memadukan faktor dalam SWOT, yaitu peluang, tantangan, kekuatan, dan kelemahan. Dibawah ini adalah gambar perumusan strategi dan hasil analisa SWOT.



Gambar. 5. Matrik SWOT Perumusan Strategi

⁷³ Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2005). Buku Rencana Strategis . Jakarta: Bappenas RI.

13. 6. Strategi Variabel dan Strategi Terpilih

13. 6. 1. Strategi Variabel SO

Tabel. 6. Matriks Strategi SO

No. Analisis SWOT: Variabel S-O	
1.	Kesadaran lingkungan yang meningkat: masyarakat semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan dan pelestarian lingkungan, yang dapat mendukung integrasi ekonomi hijau dalam kurikulum pendidikan
2.	Potensi penghematan dan efisiensi: konsep ekonomi hijau dapat membantu menghasilkan solusi yang lebih efisien dan hemat sumber daya, yang pada gilirannya dapat memberikan manfaat ekonomi
3.	Inovasi dan kreativitas: fokus pada keberlanjutan dapat mendorong inovasi dan kreativitas dalam pendekatan bisnis dan ekonomi, yang dapat diajarkan dan dikembangkan melalui kurikulum pendidikan
4.	Kolaborasi antar disiplin ilmu: integrasi ekonomi hijau membutuhkan kolaborasi antara berbagai disiplin ilmu, yang dapat memperkaya pengalaman belajar siswa dan memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang isu-isu lingkungan dan ekonomi.
5.	Konsep ekonomi hijau telah di ajarkan di beberapa kampus dan sekolah, dan ini bisa menjadi contoh jika ingin dimasukkan kedalam kurikulum
6.	Daya saing global: negara atau institusi pendidikan yang mengadopsi pendekatan ini dapat meningkatkan daya saing mereka dalam skenario global dengan menciptakan tenaga kerja yang terampil dan terlatih dalam praktik ekonomi hijau
7.	Kemitraan dengan industri: kolaborasi dengan industri dan organisasi non-pemerintah dapat menyediakan kesempatan untuk memperkuat kurikulum pendidikan dengan memperkenalkan siswa pada aplikasi praktis dari konsep-konsep ekonomi hijau
8.	Peningkatan inovasi dan penelitian: fokus pada ekonomi hijau dalam kurikulum pendidikan dapat mendorong inovasi dan penelitian dalam teknologi dan praktik yang mendukung pembangunan berkelanjutan, seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan penggunaan sumber daya secara efisien.

9.	Peningkatan kesadaran dan pendidikan: integrasi kurikulum pendidikan dengan konsep ekonomi hijau dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman generasi muda tentang pentingnya pembangunan berkelanjutan dan praktik ekonomi yang ramah lingkungan
10.	Peningkatan kepatuhan regulasi: dengan menekankan ekonomi hijau dalam kurikulum pendidikan, dapat ditingkatkan pemahaman tentang regulasi lingkungan dan mendorong kepatuhan terhadap standar lingkungan yang lebih ketat.

13. 6. 2. Strategi Terpilih

Tabel. 7. Matriks Strategi Terpilih (S-O)

No.	Strategi Terpilih (SO)
1.	Tingkatkan kesadaran lingkungan yang meningkat: masyarakat semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan dan pelestarian lingkungan, yang dapat mendukung integrasi ekonomi hijau dalam kurikulum pendidikan, oleh karena itu kesadaran ini harus terus ditingkatkan
2.	Gunakan potensi penghematan dan efisiensi: konsep ekonomi hijau dapat membantu menghasilkan pendidikan yang lebih efisien dan hemat sumber daya, yang pada gilirannya dapat memberikan manfaat ekonomi
3.	Gunakan transformasi digital pendidikan untuk memperluas e-learning, meningkatkan keterampilan digital, akses terpencil, dan kesiapan kerja.
4.	Implementasikan kolaborasi antar disiplin ilmu: integrasi ekonomi hijau membutuhkan kolaborasi antara berbagai disiplin ilmu, yang dapat memperkaya pengalaman belajar siswa dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu lingkungan dan ekonomi.
5.	Adopsi konsep ekonomi hijau yang telah di ajarkan di beberapa kampus dan sekolah, dan ini bisa menjadi contoh jika ingin dimasukkan ke dalam kurikulum
6.	Gunakan potensi daya saing global: negara atau institusi pendidikan yang mengadopsi pendekatan ini dapat meningkatkan daya saing mereka dalam pendidik global dengan menciptakan tenaga kerja yang terampil dan terlatih dalam praktik ekonomi hijau

7.	Tingkat keterlibatan kemitraan dengan industri: kolaborasi dengan industri dan organisasi non-pemerintah dapat menyediakan kesempatan untuk memperkuat kurikulum pendidikan dengan memperkenalkan siswa pada aplikasi praktis dari konsep-konsep ekonomi hijau
8.	Gunakan potensi peningkatan inovasi dan penelitian: fokus pada ekonomi hijau dalam kurikulum Pendidikan dapat mendorong inovasi dan penelitian dalam teknologi dan praktik yang mendukung pendidikan berkelanjutan, seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan penggunaan sumber daya secara efisien.
9.	Gunakan potensi peningkatan kesadaran dan pendidikan: integrasi kurikulum pendidikan dengan konsep ekonomi hijau dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman generasi muda tentang pentingnya pendidikan berkelanjutan dan praktik ekonomi yang ramah lingkungan
10.	Gunakan potensi peningkatan kepatuhan regulasi: dengan menekankan ekonomi hijau dalam kurikulum pendidikan, dapat ditingkatkan pemahaman tentang regulasi lingkungan dan mendorong kepatuhan terhadap standar lingkungan yang lebih ketat.

13. 6. 3. Strategi Variabel S-T

Tabel. 8. Matriks Strategi S-T

No.	Analisis SWOT: Variabel S-T
1.	Kesadaran Lingkungan yang Meningkat: Masyarakat semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan dan pelestarian lingkungan, yang dapat mendukung integrasi ekonomi hijau dalam kurikulum pendidikan
2.	Potensi Penghematan dan Efisiensi: Konsep ekonomi hijau dapat membantu menghasilkan solusi yang lebih efisien dan hemat sumber daya, yang pada gilirannya dapat memberikan manfaat ekonomi
3.	Inovasi dan Kreativitas: Fokus pada keberlanjutan dapat mendorong inovasi dan kreativitas dalam pendekatan bisnis dan ekonomi, yang dapat diajarkan dan dikembangkan melalui kurikulum pendidikan

4.	Kolaborasi Antar Disiplin Ilmu: Integrasi ekonomi hijau membutuhkan kolaborasi antara berbagai disiplin ilmu, yang dapat memperkaya pengalaman belajar siswa dan memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang isu-isu lingkungan dan ekonomi.
5.	Konsep ekonomi hijau telah di ajarkan di beberapa kampus dan sekolah, dan ini bisa menjadi contoh jika ingin dimasukkan kedalam kurikulum
6.	Perlawanan terhadap perubahan: tidak semua pihak mungkin akan mendukung perubahan dalam kurikulum untuk mengintegrasikan ekonomi hijau, terutama jika itu membutuhkan pengorbanan atau perubahan signifikan dalam cara berpikir atau beroperasi.
7.	Kurangnya konsensus tentang konsep ekonomi hijau: konsep ekonomi hijau masih terus berkembang dan terkadang kontroversial. Kurangnya konsensus tentang apa yang sebenarnya melibatkan ekonomi hijau dapat menyulitkan pengembangan kurikulum yang kohesif dan efektif.
8.	Ketergantungan pada Model Ekonomi Konvensional: Pendidikan yang terlalu didominasi oleh model ekonomi konvensional dapat menghambat integrasi konsep-konsep ekonomi hijau yang lebih berkelanjutan
9.	Resistensi Budaya: Budaya yang mementingkan pertumbuhan ekonomi konvensional dan kurang peduli terhadap lingkungan dapat menjadi hambatan utama dalam mengadopsi pendekatan ekonomi hijau dalam pendidikan
10.	Keterbatasan Pemahaman dan Keterampilan Guru: Guru yang tidak memahami konsep ekonomi hijau atau kurang memiliki keterampilan dalam pengajaran berkelanjutan dapat menjadi hambatan dalam efektivitas integrasi ini.

13. 6. 4. Strategi Terpilih S-T

Tabel. 9. Matriks Strategi Terpilih (S-T)

No.	Analisis SWOT: Strategi Terpilih S-T
1.	Tingkatkan Kesadaran Lingkungan yang Meningkat: Masyarakat semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan dan pelestarian lingkungan, yang dapat mendukung integrasi ekonomi hijau dalam kurikulum pendidikan, oleh karena itu kesadaran ini harus terus ditingkatkan

2.	Gunakan Potensi Penghematan dan Efisiensi: Konsep ekonomi hijau dapat membantu menghasilkan 63endid yang lebih efisien dan hemat sumber daya, yang pada gilirannya dapat memberikan manfaat ekonomi
3.	Gunakan transformasi digital Pendidikan untuk memperluas e-learning, meningkatkan keterampilan digital, akses terpencil, dan kesiapan kerja.
4.	Implementasikan Kolaborasi Antar Disiplin Ilmu: Integrasi ekonomi hijau membutuhkan kolaborasi antara berbagai disiplin ilmu, yang dapat memperkaya pengalaman belajar siswa dan memberikan pemahaman yang lebih 63endidik tentang isu-isu lingkungan dan ekonomi.
5.	Adopsi Konsep ekonomi hijau yang telah di ajarkan di beberapa kampus dan sekolah, dan ini bisa menjadi contoh jika ingin dimasukkan kedalam kurikulum
6.	Mendorong Adaptasi terhadap Perubahan: sehingga semua pihak mungkin dapat mendukung perubahan dalam kurikulum untuk mengintegrasikan ekonomi hijau,
7.	Mendorong Implementasi Konsensus tentang Konsep Ekonomi Hijau: Konsep ekonomi hijau masih terus berkembang dan terkadang kontroversial. Sehingga dibutuhkan 63onsensus tentang apa yang sebenarnya melibatkan ekonomi hijau dapat menyulitkan pengembangan kurikulum yang kohesif dan efektif.
8.	Mengurangi Tingkat Ketergantungan pada Model Ekonomi Konvensional: sehingga Pendidikan yang terlalu didominasi oleh model ekonomi konvensional dapat melakukan integrasi konsep-konsep ekonomi hijau yang lebih berkelanjutan
9.	Mengurangi Resistensi Budaya: perlu dikurangi dan merubah Budaya yang mementingkan pertumbuhan ekonomi konvensional dan kurang peduli terhadap lingkungan dapat menjadi hambatan utama dalam mengadopsi pendekatan ekonomi hijau dalam pendidikan
10.	Meningkatkan Keterbatasan Pemahaman dan Keterampilan Guru: Guru yang tidak memahami konsep ekonomi hijau atau kurang memiliki keterampilan dalam pengajaran berkelanjutan harus dilatih agar memiliki pemahaman tentang ekonomi Hijau

13. 6. 5. Strategi Variabel W-O

Tabel. 10. Matriks Strategi W-O

No.	Analisis SWOT: Variabel W-O
1.	Keterbatasan Sumber Daya: Kurangnya sumber daya, baik dalam hal dana maupun tenaga pengajar yang terlatih, dapat menjadi hambatan untuk mengintegrasikan materi ekonomi hijau ke dalam kurikulum pendidikan
2.	Kurangnya Kesiapan Tenaga Pengajar: Banyak tenaga pengajar mungkin belum memiliki pengetahuan atau keterampilan yang cukup dalam bidang ekonomi hijau untuk mengajar materi tersebut secara efektif
3.	Tantangan Administratif: Integrasi kurikulum baru dapat melibatkan tantangan administratif, seperti penyesuaian kurikulum yang sudah ada atau mengatasi hambatan birokrasi institusi
4.	Kurikulum yang Padat: Penambahan materi baru ke dalam kurikulum yang sudah padat bisa menyebabkan kurangnya waktu untuk mempelajari materi yang sudah ada atau menimbulkan kelelahan siswa dan guru
5.	Kurangnya Sumber Daya: Implementasi kurikulum baru memerlukan sumber daya tambahan seperti pelatihan guru, bahan ajar, dan infrastruktur yang memadai, yang mungkin tidak selalu tersedia.
6.	Daya Saing Global: Negara atau institusi pendidikan yang mengadopsi pendekatan ini dapat meningkatkan daya saing mereka dalam skenario global dengan menciptakan tenaga kerja yang terampil dan terlatih dalam praktik ekonomi hijau
7.	Kemitraan dengan Industri: Kolaborasi dengan industri dan organisasi non-pemerintah dapat menyediakan kesempatan untuk memperkuat kurikulum pendidikan dengan memperkenalkan siswa pada aplikasi praktis dari konsep-konsep ekonomi hijau
8.	Peningkatan Inovasi dan Penelitian: Fokus pada ekonomi hijau dalam kurikulum pendidikan dapat mendorong inovasi dan penelitian dalam teknologi dan praktik yang mendukung pembangunan berkelanjutan, seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan penggunaan sumber daya secara efisien.

9.	Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan: Integrasi kurikulum pendidikan dengan konsep ekonomi hijau dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman generasi muda tentang pentingnya pembangunan berkelanjutan dan praktik ekonomi yang ramah lingkungan
10.	Peningkatan Kepatuhan Regulasi: Dengan menekankan ekonomi hijau dalam kurikulum pendidikan, dapat ditingkatkan pemahaman tentang regulasi lingkungan dan mendorong kepatuhan terhadap standar lingkungan yang lebih ketat.

13. 6. 6. Strategi Terpilih Variabel W-O

Tabel. 11. Matriks Strategi Terpilih (W-O)

No.	Analisis SWOT: Strategi Terpilih W-O
1.	Peningkatan Sumber Daya: Peningkatan sumber daya, baik dalam hal dana maupun tenaga pengajar yang terlatih, dapat menjadi faktor positif untuk mengintegrasikan materi ekonomi hijau ke dalam kurikulum pendidikan
2.	Meningkatkan Kesiapan Tenaga Pengajar: Dengan meningkatkan pengetahuan atau keterampilan yang cukup dalam bidang ekonomi hijau untuk mengajar materi tersebut secara efektif
3.	Mengurangi Hambatan Administratif: Integrasi kurikulum baru dapat melibatkan tantangan administratif, seperti penyesuaian kurikulum yang sudah ada atau mengatasi hambatan birokrasi institusi
4.	Strategi Penyesuaian Kurikulum yang Padat: Penambahan materi baru ke dalam kurikulum yang sudah padat disesuaikan agar tidak membebani siswa dan guru
5.	Peningkatan Sumber Daya: untuk memudahkan implementasi kurikulum baru diperlukan sumber daya tambahan seperti pelatihan guru, bahan ajar, dan infrastruktur yang memadai, yang mungkin tidak selalu tersedia.
6.	Melakukan adaptasi agar dapat memiliki Daya Saing Global: Negara atau institusi pendidikan yang mengadopsi pendekatan ini dapat meningkatkan daya saing mereka dalam skenario global dengan menciptakan tenaga kerja yang terampil dan terlatih dalam praktik ekonomi hijau

7.	Strategi Kemitraan dengan Industri: Kolaborasi dengan industri dan organisasi non-pemerintah dapat menyediakan kesempatan untuk memperkuat kurikulum pendidikan dengan memperkenalkan siswa pada aplikasi praktis dari konsep-konsep ekonomi hijau
8.	Strategi Peningkatan Inovasi dan Penelitian: Fokus pada ekonomi hijau dalam kurikulum pendidikan dapat mendorong inovasi dan penelitian dalam teknologi dan praktik yang mendukung pembangunan berkelanjutan, seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan penggunaan sumber daya secara efisien.
9.	Adopsi Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan: Integrasi kurikulum pendidikan dengan konsep ekonomi hijau dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman generasi muda tentang pentingnya pembangunan berkelanjutan dan praktik ekonomi yang ramah lingkungan
10.	Peningkatan Kepatuhan Regulasi: Dengan menekankan ekonomi hijau dalam kurikulum pendidikan, dapat ditingkatkan pemahaman tentang regulasi lingkungan dan mendorong kepatuhan terhadap standar lingkungan yang lebih ketat.

13. 6. 7. Strategi Variabel W-T

Tabel. 12. Analisis SWOT Matriks Variabel W-T

No. Analisis SWOT: Variabel W-T	
1.	Keterbatasan Sumber Daya: Kurangnya sumber daya, baik dalam hal dana maupun tenaga pengajar yang terlatih, dapat menjadi hambatan untuk mengintegrasikan materi ekonomi hijau ke dalam kurikulum pendidikan
2.	Kurangnya Kesiapan Tenaga Pengajar: Banyak tenaga pengajar mungkin belum memiliki pengetahuan atau keterampilan yang cukup dalam bidang ekonomi hijau untuk mengajar materi tersebut secara efektif
3.	Tantangan Administratif: Integrasi kurikulum baru dapat melibatkan tantangan administratif, seperti penyesuaian kurikulum yang sudah ada atau mengatasi hambatan birokrasi institusi

4.	Kurikulum yang Padat: Penambahan materi baru ke dalam kurikulum yang sudah padat bisa menyebabkan kurangnya waktu untuk mempelajari materi yang sudah ada atau menimbulkan kelelahan siswa dan guru
5.	Kurangnya Sumber Daya: Implementasi kurikulum baru memerlukan sumber daya tambahan seperti pelatihan guru, bahan ajar, dan infrastruktur yang memadai, yang mungkin tidak selalu tersedia.
6.	Perlawanan terhadap Perubahan: Tidak semua pihak mungkin akan mendukung perubahan dalam kurikulum untuk mengintegrasikan ekonomi hijau, terutama jika itu membutuhkan pengorbanan atau perubahan signifikan dalam cara berpikir atau beroperasi.
7.	Kurangnya Konsensus tentang Konsep Ekonomi Hijau: Konsep ekonomi hijau masih terus berkembang dan terkadang kontroversial. Kurangnya konsensus tentang apa yang sebenarnya melibatkan ekonomi hijau dapat menyulitkan pengembangan kurikulum yang kohesif dan efektif.
8.	Ketergantungan pada Model Ekonomi Konvensional: Pendidikan yang terlalu didominasi oleh model ekonomi konvensional dapat menghambat integrasi konsep-konsep ekonomi hijau yang lebih berkelanjutan
9.	Resistensi Budaya: Budaya yang mementingkan pertumbuhan ekonomi konvensional dan kurang peduli terhadap lingkungan dapat menjadi hambatan utama dalam mengadopsi pendekatan ekonomi hijau dalam pendidikan
10.	Keterbatasan Pemahaman dan Keterampilan Guru: Guru yang tidak memahami konsep ekonomi hijau atau kurang memiliki keterampilan dalam pengajaran berkelanjutan dapat menjadi hambatan dalam efektivitas integrasi ini

13. 6. 8. Strategi Terpilih Variabel W-T

Tabel. 13. Matrik Strategi Terpilih Variabel W-T

No. Strategi Terpilih Variabel W-T	
1.	Peningkatan Sumber Daya: Peningkatan sumber daya, baik dalam hal dana maupun tenaga pengajar yang terlatih, dapat menjadi faktor positif untuk mengintegrasikan materi ekonomi hijau ke dalam kurikulum pendidikan

2.	Meningkatkan Kesiapan Tenaga Pengajar: Dengan meningkatkan pengetahuan atau keterampilan yang cukup dalam bidang ekonomi hijau untuk mengajar materi tersebut secara efektif
3.	Mengurangi Hambatan Administratif: Integrasi kurikulum baru dapat melibatkan tantangan administratif, seperti penyesuaian kurikulum yang sudah ada atau mengatasi hambatan birokrasi institusi
4.	Strategi Penyesuaian Kurikulum yang Padat: Penambahan materi baru ke dalam kurikulum yang sudah padat disesuaikan agar tidak membebani siswa dan guru
5.	Peningkatan Sumber Daya: untuk memudahkan Implementasi kurikulum baru diperlukan sumber daya tambahan seperti pelatihan guru, bahan ajar, dan infrastruktur yang memadai, yang mungkin tidak selalu tersedia.
6.	Mendorong Adaptasi terhadap Perubahan: sehingga semua pihak mungkin dapat mendukung perubahan dalam kurikulum untuk mengintegrasikan ekonomi hijau,
7.	Mendorong Implementasi Konsensus tentang Konsep Ekonomi Hijau: Konsep ekonomi hijau masih terus berkembang dan terkadang kontroversial. Sehingga dibutuhkan konsensus tentang apa yang sebenarnya melibatkan ekonomi hijau dapat menyulitkan pengembangan kurikulum yang kohesif dan efektif.
8.	Mengurangi Tingkat Ketergantungan pada Model Ekonomi Konvensional: sehingga Pendidikan yang terlalu didominasi oleh model ekonomi konvensional dapat melakukan integrasi konsep-konsep ekonomi hijau yang lebih berkelanjutan
9.	Mengurangi Resistensi Budaya: perlu dikurangi dan merubah Budaya yang mementingkan pertumbuhan ekonomi konvensional dan kurang peduli terhadap lingkungan dapat menjadi hambatan utama dalam mengadopsi pendekatan ekonomi hijau dalam pendidikan
10.	Meningkatkan Keterbatasan Pemahaman dan Keterampilan Guru: Guru yang tidak memahami konsep ekonomi hijau atau kurang memiliki keterampilan dalam pengajaran berkelanjutan harus dilatih agar memiliki pemahaman tentang ekonomi Hijau

14. **Analisa PESTLE Pada Integrasi Ekonomi Hijau dan Kurikulum Pendidikan Guna Mendorong Pembangunan Berkelanjutan**

Metode deskriptif analisis PESTLE adalah merupakan suatu metode analisis dengan cara identifikasi berbagai faktor eksternal yang dapat memberikan pengaruh terhadap suatu organisasi, seperti faktor sosial, ekonomi, politik, hukum, teknologi dan faktor lingkungan. Metode analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi suatu organisasi atau bisnis. Analisa PESTLE dapat digunakan untuk mempertimbangkan faktor-faktor permasalahan eksternal, yaitu Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi, Hukum, dan Lingkungan⁷⁴. Analisa dengan metode ini membantu organisasi untuk mengetahui kemungkinan efek dari faktor-faktor dimaksud, dan menanggapiinya, serta mengembangkan strategiyang sesuai. Berikut adalah gambar komponen analisa PESTLE.



ambar. 6. Komponen Analisa PESTLE⁷⁵

14. 1. **ANALISA PESTLE Integrasi Ekonomi Hijau Dan Kurikulum Pendidikan**

Analisis PESTLE adalah alat yang berguna untuk memahami faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi integrasi ekonomi hijau dalam kurikulum pendidikan.

⁷⁴ <https://www.jurnal.id/id/blog/model-bisnis-pestel/>

⁷⁵ https://idmetafora.com/id/blog/read/2763/Memahami-Analisis-PESTLE-Pengertian-Tujuan-Manfaat-Komponen-Dan-Contoh-Penerapannya.html#google_vignette

Berikut adalah analisis PESTLE untuk integrasi tersebut:

1. Political (Politik)

- **Kebijakan Pemerintah:** Kebijakan pemerintah tentang keberlanjutan dan lingkungan dapat memengaruhi dukungan dan insentif untuk mengintegrasikan ekonomi hijau dalam kurikulum pendidikan.
- **Regulasi Lingkungan:** Peraturan lingkungan yang ketat dapat mendorong pendidikan yang lebih berfokus pada keberlanjutan dan ekonomi hijau.

2. Economic (Ekonomi)

- **Kondisi Ekonomi:** Kondisi ekonomi saat ini dan proyeksi pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi dukungan finansial untuk pengembangan kurikulum yang berorientasi pada ekonomi hijau.
- **Investasi Berkelanjutan:** Dorongan untuk investasi berkelanjutan dapat memperkuat permintaan untuk lulusan yang memiliki pemahaman tentang ekonomi hijau.

3. Social (Sosial)

- **Kesadaran Publik:** Tingkat kesadaran masyarakat tentang isu-isu lingkungan dan keberlanjutan dapat memengaruhi permintaan untuk pendidikan yang berfokus pada ekonomi hijau.
- **Nilai dan Norma:** Nilai dan norma sosial tentang lingkungan dan keberlanjutan dapat mempengaruhi penerimaan dan implementasi kurikulum pendidikan yang berorientasi pada ekonomi hijau.

4. Technological (Teknologi)

- **Inovasi Teknologi Hijau:** Kemajuan dalam teknologi hijau dapat menyediakan peluang untuk mengintegrasikan teknologi terbaru ke dalam kurikulum pendidikan.

- **Platform Pembelajaran Digital:** Penggunaan platform pembelajaran digital dan teknologi pendukung lainnya dapat memfasilitasi pengajaran dan pembelajaran materi ekonomi hijau secara lebih efektif.

5. Legal (Hukum)

- **Peraturan Pendidikan:** Peraturan pendidikan, seperti standar nasional atau regional, dapat mempengaruhi kemampuan institusi pendidikan untuk mengubah atau menyesuaikan kurikulum mereka untuk mengintegrasikan ekonomi hijau.
- **Perlindungan Lingkungan:** Hukum-hukum yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan dapat mempengaruhi penekanan pada konsep ekonomi hijau dalam kurikulum pendidikan.

6. Environmental (Lingkungan)

- **Perubahan Lingkungan:** Perubahan lingkungan global, seperti perubahan iklim, dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan yang berfokus pada keberlanjutan dan ekonomi hijau.
- **Kerentanan Lingkungan:** Kerentanan lingkungan yang semakin meningkat dapat memperkuat argumen untuk memasukkan materi ekonomi hijau dalam kurikulum pendidikan.

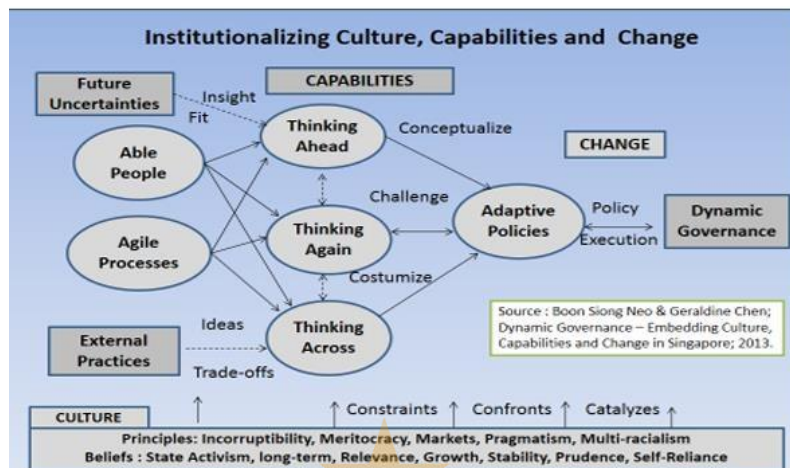
Atas dasar pertimbangan faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, dan lingkungan yang dapat mempengaruhi integrasi ekonomi hijau dalam kurikulum pendidikan, institusi pendidikan dapat mengidentifikasi peluang dan tantangan yang relevan serta merencanakan strategi yang tepat untuk mempromosikan pendidikan berkelanjutan. Dengan analisis PESTLE, gagasan integrasi ekonomi hijau dan kurikulum pendidikan guna mendorong pembangunan berkelanjutan mendapatkan perspektif baru tentang lingkungan makro dari banyak perspektif.

Analisis ini sendiri cukup fleksibel, memungkinkan bagi kita untuk membuat keputusan yang lebih baik dan merencanakan integrasi ekonomim hijau dan kurikulum pendidikan kedepan secara efektif. Analisis PESTLE adalah metode manajemen risiko yang digunakan untuk menilai lingkungan eksternal lembaga pendidikan atau perusahaan.

15. Analisa Dynamic Governance (DG) Pada Integrasi Ekonomi Hijau dan Kurikulum Pendidikan Guna Mendorong Pembangunan Berkelanjutan

Konsep Dynamic Governance yang dikenal saat ini merupakan satu kemampuan pemerintah untuk terus menyesuaikan kebijakan dan program publik, serta pola mengubah cara kebijakan publik tersebut dirumuskan dan dilaksanakan, sehingga berdampak pada kepentingan jangka panjang dicapai. Kondisi kedinamisan dalam pemerintahan sangat penting bagi pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan terutama lingkungan yang pada mengalami ketidakpastian dan perubahan yang cepat dimana masyarakat yang semakin menuntut kecanggihan, berpendidikan, dan lebih terdampak globalisasi serta lahirnya berbagai konsep baru dalam penyelenggaraan pemerintahan dan persaingan global.

Implementasi konsep dynamic governance dapat dilihat dalam indikator thinking ahead pada integrasi ekonomi hijau dan kurikulum Pendidikan guna mendorong Pembangunan berkelanjutan. Dalam penulisan taskap ini, penulis menggunakan teori Dynamic Governance yang dikemukakan oleh Neo and Chen. Neo dan Chen (Boon & Geraldin, 2007) mengemukakan bahwa "Dynamic Governance is the ability of a governanceto continually adjust it is public policies and programs as well as change the way they are formulated and implemented, so that the long-term interests ofthe nation are achieved". Menurut Neo dan Chen, pada dasarnya konsep dynamic governance tertuju pada perubahan yang hanya menekankan padadua kunci penting, yaitu Capalities dan Culture. Oleh karena itu, Neo dan Chen merumuskan kerangka pemikiran sederhana yang mengacu pada terbentuknya konsep dynamic governance sebagai berikut: Gambar. 7 Kerangka Pemikiran Dynamic Governance.



Gambar .7. Kerangka Pemikiran Dynamic Governance

Analisis Dynamic Governance (DG) dalam konteks integrasi ekonomi hijau dan kurikulum pendidikan mengacu pada pendekatan yang responsif terhadap perubahan dinamis dalam lingkungan eksternal dan internal. Berikut adalah analisis DG untuk integrasi ekonomi hijau dan kurikulum:

1. Responsif terhadap Perubahan Lingkungan Eksternal

- Tren Global tentang Keberlanjutan: DG memungkinkan institusi pendidikan untuk merespons tren global yang semakin menekankan pentingnya keberlanjutan dan ekonomi hijau.
- Peraturan Pemerintah: Institusi pendidikan harus mampu beradaptasi dengan perubahan regulasi pemerintah yang mempengaruhi integrasi ekonomi hijau dalam kurikulum.

2. Keterlibatan dan Keterbukaan dalam Pengambilan Keputusan

- Pendekatan DG memungkinkan institusi pendidikan untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa, staf pengajar, dan industri, dalam proses pengambilan keputusan tentang integrasi ekonomi hijau.
- Institusi pendidikan perlu menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam mengambil keputusan terkait integrasi ekonomi hijau, sehingga membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan.

3. Adaptabilitas terhadap Perubahan Internal

- Institusi pendidikan harus memiliki mekanisme untuk meningkatkan kapasitas tenaga pengajar dalam memahami dan mengajar konsep-konsep ekonomi hijau.
- Pendekatan DG memungkinkan institusi pendidikan untuk secara fleksibel menyesuaikan kurikulum mereka dengan memasukkan atau mengubah materi yang berkaitan dengan ekonomi hijau sesuai dengan perubahan kebutuhan dan tuntutan pasar.

4 . Pengelolaan Risiko dan Ketidakpastian

- Institusi pendidikan perlu melakukan evaluasi risiko terkait dengan integrasi ekonomi hijau dalam kurikulum, termasuk potensi dampak positif dan negatif.
- DG memungkinkan institusi pendidikan untuk mengembangkan strategi untuk mengelola ketidakpastian yang terkait dengan perubahan dalam lingkungan eksternal dan internal.

5. Pembelajaran dan Inovasi Berkelanjutan

- Pendekatan DG mendorong institusi pendidikan untuk mengadopsi siklus pembelajaran berkelanjutan, di mana mereka terus memperbaiki dan memperbarui pendekatan mereka terhadap integrasi ekonomi hijau dalam kurikulum.
- DG memungkinkan institusi pendidikan untuk mendorong inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi baru dan metode pembelajaran yang inovatif.

Analisis DG terhadap integrasi ekonomi hijau dan kurikulum pendidikan menekankan pentingnya responsif terhadap perubahan lingkungan eksternal dan internal, serta keterlibatan aktif pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, pendekatan DG dapat membantu institusi pendidikan dalam mengembangkan strategi yang adaptif dan berkelanjutan untuk mendorong pendidikan berkelanjutan.

16. Pelaksanaan Materi Kuliah tentang Ekonomi Hijau pada Kurikulum Pendidikan di Perguruan Tinggi Saat Ini

A. Pelaksanaan Materi Kuliah tentang Ekonomi Hijau pada Kurikulum Pendidikan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sebagai salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia, mulai memasukkan isu-isu tentang ekonomi hijau ke dalam kurikulum pendidikannya. Ekonomi hijau adalah konsep yang berfokus pada pengembangan ekonomi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Penerapan materi ini di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi tantangan lingkungan dan mempromosikan solusi yang berkelanjutan. Berikut adalah beberapa uraian tentang bagaimana materi kuliah dan aktivitas mengenai ekonomi hijau dilaksanakan di kampus UIN Jakarta.

1. Integrasi dalam Kurikulum

Di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, materi tentang ekonomi hijau mulai diintegrasikan dalam berbagai program studi. Ini termasuk penambahan mata kuliah yang secara khusus membahas topik-topik seperti pengelolaan sumber daya alam, dampak lingkungan dari kegiatan ekonomi, dan kebijakan keberlanjutan. Contohnya, program studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis mulai memperkenalkan mata kuliah yang membahas bagaimana prinsip-prinsip ekonomi hijau dapat diterapkan dalam kebijakan ekonomi dan bisnis.

Selain itu, beberapa fakultas di kampus ini mungkin juga memasukkan elemen ekonomi hijau dalam mata kuliah lain, seperti manajemen, atau hukum. Ini menunjukkan komitmen kampus untuk tidak hanya menyediakan pengetahuan yang spesifik, tetapi juga mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam berbagai disiplin ilmu. Akan tetapi untuk mendorong keseragaman materi dan standard pengajaran yang sama disemua perguruan tinggi, maka integrasi konsep ekonomi hijau dan kurikulum perlu dilakukan dan diwujudkan dalam wujud kurikulum ekonomi hijau.

2. Tantangan dalam Pelaksanaan

tantangan masih perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya dan fasilitas. Untuk mengajarkan ekonomi hijau secara efektif, diperlukan bahan ajar yang up-to-date dan fasilitas yang mendukung, seperti laboratorium untuk penelitian lingkungan. Pengadaan dan pemeliharaan sumber daya ini bisa menjadi beban tambahan bagi kampus. Selain itu, tidak semua dosen mungkin memiliki latar belakang atau pelatihan khusus dalam ekonomi hijau. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas pengajaran dan pemahaman mahasiswa tentang topik ini. Untuk mengatasi hal ini, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta perlu mengadakan pelatihan atau workshop bagi dosen agar mereka dapat mengajarkan materi dengan lebih efektif.

3. Peluang untuk Pengembangan

Ada banyak peluang untuk memperkuat pelaksanaan materi ekonomi hijau di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kolaborasi dengan industri dan organisasi lingkungan. Melalui kerja sama ini, mahasiswa dapat terlibat dalam proyek-proyek nyata yang berhubungan dengan keberlanjutan, seperti penelitian tentang energi terbarukan atau pengelolaan sampah.

Selain itu, kampus dapat memanfaatkan teknologi dan media digital untuk memperkaya materi kuliah. Misalnya, penggunaan simulasi komputer dan aplikasi online untuk analisis dampak lingkungan dapat membantu mahasiswa memahami konsep ekonomi hijau dengan lebih baik.

4. Contoh Penerapan yang Positif

Beberapa inisiatif positif yang mungkin dilakukan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta termasuk penyelenggaraan seminar atau workshop yang fokus pada ekonomi hijau dan keberlanjutan. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang isu lingkungan tetapi juga memberikan mereka kesempatan untuk belajar dari praktisi dan ahli di bidang ini.

Saat ini Kampus UIN Syarif Hidayatulah Jakarta telah menunjukkan komitmennya terhadap keberlanjutan dan lingkungan dengan beberapa inisiatif yang mendukung statusnya sebagai "Kampus Hijau." Berikut adalah fakta dan data yang menguraikan pencapaian dan upaya kampus tersebut dalam mencapai status Kampus Hijau:

1. Pengakuan dan Sertifikasi

Green Metric UI: UIN Syarif Hidayatulah Jakarta tercatat dalam daftar Green Metric UI, yang merupakan peringkat global dari Universitas Indonesia yang menilai keberlanjutan kampus di seluruh dunia. Penilaian ini mencakup berbagai aspek seperti pengelolaan energi, air, dan sampah. Tercantum dalam daftar ini menunjukkan bahwa kampus telah memenuhi kriteria yang diatur oleh Green Metric UI dalam hal keberlanjutan.

2. Inisiatif Pengelolaan Lingkungan

- **Penanaman Pohon dan Ruang Terbuka Hijau:** Kampus ini secara aktif terlibat dalam penanaman pohon dan pengelolaan ruang terbuka hijau. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas udara dan menyediakan ruang hijau bagi komunitas kampus. Misalnya, program penanaman pohon yang dilakukan secara berkala merupakan salah satu inisiatif penting untuk mendukung lingkungan yang lebih sehat.
- **Pengelolaan Sampah:** UIN Syarif Hidayatulah Jakarta memiliki sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dengan program daur ulang. Kampus ini mengimplementasikan pemisahan sampah organik dan non-organik, serta memiliki program daur ulang untuk mengurangi jumlah limbah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir.

3. Penggunaan Energi dan Air

- **Energi Terbarukan:** Kampus ini telah mulai menggunakan sumber energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Ini termasuk pemasangan panel surya di beberapa fasilitas untuk menghasilkan listrik dari sumber energi terbarukan.

- Efisiensi Energi: Upaya untuk mengurangi konsumsi energi termasuk penggunaan lampu LED dan peralatan yang efisien energi di seluruh area kampus. Langkah-langkah ini membantu mengurangi jejak karbon kampus.
- Pengelolaan Air Kampus ini menerapkan sistem pengelolaan air yang efisien, termasuk penggunaan teknologi untuk menghemat air dan mengelola limbah air dengan cara yang ramah lingkungan.

4. Kurikulum dan Edukasi

- Materi Kuliah dan Penelitian: UIN Syarif Hidayatulah Jakarta telah memasukkan materi tentang ekonomi hijau dan keberlanjutan dalam kurikulum pendidikan. Ini termasuk mata kuliah yang membahas pengelolaan sumber daya alam, dampak lingkungan, dan kebijakan keberlanjutan. Kampus juga mendukung penelitian di bidang keberlanjutan, dengan fokus pada solusi dan inovasi ramah lingkungan.
- Kegiatan Edukasi dan Kesadaran: Kampus sering mengadakan seminar, workshop, dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa dan staf tentang pentingnya keberlanjutan dan praktik ramah lingkungan.

UIN Syarif Hidayatulah Jakarta telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap konsep Kampus Hijau melalui berbagai inisiatif dan program. Dengan mendapatkan pengakuan dari Green Metric UI, mengimplementasikan sistem pengelolaan lingkungan yang efektif, dan mengintegrasikan pendidikan keberlanjutan dalam kurikulum, kampus ini terus berupaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan. Data dan fakta ini menunjukkan bahwa UIN Syarif Hidayatulah Jakarta tidak hanya memenuhi standar Kampus Hijau, tetapi juga berusaha untuk menjadi contoh dalam praktik keberlanjutan di tingkat perguruan tinggi.

B. Pelaksanaan Materi Kuliah tentang Ekonomi Hijau pada Kurikulum Pendidikan di Perguruan Tinggi Lain

Kurikulum pendidikan yang mencerminkan kebutuhan akan pemahaman tentang ekonomi hijau dan keberlanjutan lingkungan telah menjadi fokus penting banyak perguruan tinggi saat ini. Beberapa kampus seperti ITB, Binus, UI, UIN Raden Intan Lampung, dan lain-lain saat ini telah menerapkan kurikulum hijau atau bahkan mendesain kampus menjadi kampus Hijau dan

ramah lingkungan. Dalam mengimplementasikan kurikulum hijau ITB misalnya, mengintegrasikan isu keberlanjutan dalam kurikulumnya, termasuk pemahaman tentang etika lingkungan dan keterkaitan antara sistem ekologi dan sistem sosial⁷⁶. Selain itu beberapa perguruan tinggi juga telah mendorong dan mendesain lingkungan kampusnya menjadi Kampus Hijau. Konsep “kampus hijau” mengacu pada model di mana perguruan tinggi mengembangkan infrastruktur yang memungkinkan interaksi antara lingkungan dan penghuni universitas secara berkelanjutan⁷⁷. Bahkan saat ini ada 50 kampus versi UI Green Metric 2023 yang masuk kategori “the most sustainable university in Indonesia” dari 145 Universitas di Indonesia yang mengikuti pemeringkatan UI Green Metric 2023⁷⁸. UI GreenMetric merupakan inovasi UI yang telah dikenal luas di dunia internasional sebagai pemeringkatan perguruan tinggi pertama di dunia berbasis komitmen tinggi dalam pengelolaan lingkungan hidup kampus⁷⁹. Pemeringkatan ini secara tidak langsung menunjukkan bagi kita universitas mana saja yang peduli terhadap lingkungan, baik dalam hal konservasi air, konservasi energi, maupun pengelolaan limbah dan lingkungan. Namun, apakah ini tercermin secara eksplisit dalam setiap mata kuliah yang diajarkan di perguruan tinggi mungkin bervariasi tergantung pada institusi, fakultas, dan program studi yang bersangkutan. Saat ini di Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2022 di Indonesia tercatat ada 4.004 perguruan tinggi negeri dan swasta. Bila diperhatikan lebih rinci ada 3.107 perguruan tinggi yang berada dibawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dan 897 kampus lainnya berada dibawah Kementerian Agama. Kemudian berdasarkan statusnya, PTN di Indonesia sebanyak 184 unit, sedangkan sisanya 3.820 unit adalah kampus swasta⁸⁰.

⁷⁶ <https://amf.or.id/ekonomi-hijau-dan-peran-perguruan-tinggi-dalam-mewujudkannya/>

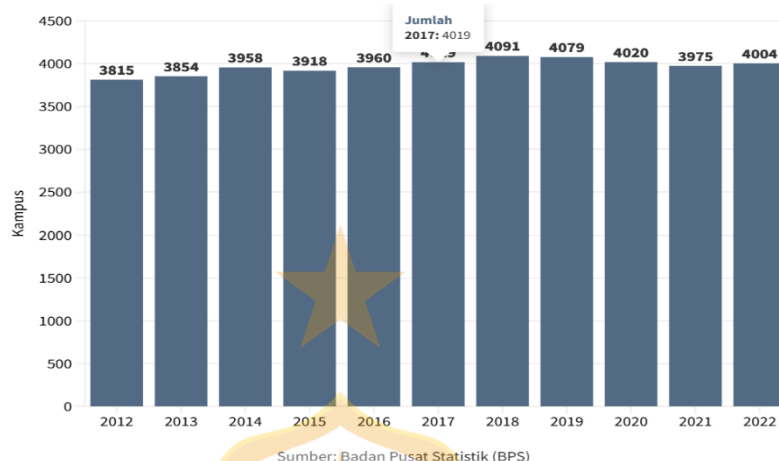
⁷⁷ <https://binus.ac.id/bekasi/2024/03/green-campus/>

⁷⁸ <https://kampus.republika.co.id/news/1623436520/50-kampus-yang-masuk-the-most-sustainable-university-in-indonesia-versi-ui-greenmetric-2023-cek-dari-kampusmu>

⁷⁹ <https://dikti.kemdikbud.go.id/kabar-dikti/kampus-kita/ui-greenmetric-umumkan-daftar-kampus-berkelanjutan-di-dunia-dan-indonesia/>

⁸⁰ <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/ZG5GNFRUZHdiRWN3YIRGSGF6QXdaVXRPTVZSQIFUMDkjMw==/jumlah-perguruan-tinggi--tenaga-pendidik--dan-mahasiswa--negeri-dan-swasta--di-bawah-kementerian-agama->

Jika merujuk pada data kampus yang ikut dalam agenda pemeringkatan UI Green Metric hanya 145 Universitas yang ikut didalamnya, maka dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini hanya ada kurang lebih 3,62 % dari 4004 Universitas di Indonesia yang peduli terhadap isu lingkungan.



Gambar. 8. Jumlah Perguruan Tinggi Di Indonesia Tahun 2012-2022⁸¹

Bahkan dari 145 universitas yang ikut pemeringkatan hanya 50 Universitas yang masuk dalam kategori “the most sustainable university in Indonesia” atau 1,24 persen dari jumlah total kampus yang ada di Indonesia saat ini. Beberapa perguruan tinggi telah mengintegrasikan mata kuliah tentang ekonomi hijau secara langsung ke dalam kurikulum mereka. Ini bisa berupa mata kuliah yang berdiri sendiri, seperti "Ekonomi Lingkungan" atau "Pembangunan Berkelanjutan", atau dapat menjadi bagian dari mata kuliah yang lebih umum seperti "Ekonomi Makro" atau "Manajemen Bisnis" dengan fokus tambahan pada aspek lingkungan. Namun, di beberapa kasus, konsep-konsep ekonomi hijau dan keberlanjutan lingkungan mungkin masih terintegrasi secara terpisah dalam berbagai mata kuliah. Misalnya, topik-topik seperti ekonomi sirkular dapat disertakan dalam mata kuliah manajemen operasi atau mata kuliah tentang rantai pasok. Selain itu, pendekatan lintas-disiplin juga semakin umum, di mana konsep-konsep ekonomi hijau dipelajari bersama-sama dengan mahasiswa dari disiplin lain.

menurut-provinsi--2022.html?year=2022

⁸¹ <https://dataindonesia.id/pendidikan/detail/ada-4004-perguruan-tinggi-di-indonesia-pada-2022>

Namun demikian, ada juga perguruan tinggi yang mungkin belum sepenuhnya mengintegrasikan konsep-konsep ini ke dalam kurikulum mereka. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk prioritas akademik, ketersediaan sumber daya, atau kurangnya pemahaman akan pentingnya ekonomi hijau di antara staf pengajar.

Di banyak perguruan tinggi, konsep-konsep ekonomi hijau telah dimasukkan ke dalam berbagai mata kuliah, baik sebagai bagian utama dari mata kuliah tersebut maupun sebagai komponen tambahan. Contohnya:

1. Mata Kuliah Ekonomi Lingkungan atau Pembangunan Berkelanjutan: Mata kuliah ini secara khusus membahas topik-topik terkait dengan ekonomi hijau, termasuk eksternalitas lingkungan, keberlanjutan, kebijakan lingkungan, dan evaluasi proyek berkelanjutan.
2. Mata Kuliah Ekonomi Makro: Banyak program ekonomi telah memperluas cakupan mata kuliah ekonomi makro untuk memasukkan topik-topik seperti pertumbuhan berkelanjutan, kebijakan moneter dan fiskal yang berkelanjutan, serta dampak lingkungan dari kebijakan ekonomi makro.
3. Mata Kuliah Manajemen Bisnis: Dalam mata kuliah ini, konsep-konsep ekonomi hijau dapat diperkenalkan dalam konteks manajemen lingkungan, inovasi hijau, dan tanggung jawab sosial perusahaan.
4. Mata Kuliah Ilmu Lingkungan atau Kajian Pembangunan Berkelanjutan: Mata kuliah-mata kuliah ini mungkin mencakup aspek ekonomi hijau dari sudut pandang ilmu lingkungan, seperti analisis siklus hidup, ekonomi sirkular, dan kebijakan pembangunan berkelanjutan.
5. Mata Kuliah Teknologi dan Inovasi Hijau: Dalam mata kuliah ini, konsep-konsep ekonomi hijau dapat diperkenalkan dalam konteks teknologi dan inovasi yang berkelanjutan, termasuk energi terbarukan, efisiensi energi, dan desain produk yang ramah lingkungan.

Meskipun konsep-konsep ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan ini semakin diintegrasikan dalam kurikulum, terkadang mereka mungkin hanya dipelajari secara terpisah atau sebagai bagian kecil dari mata kuliah yang lebih luas.

17. Kurikulum Pendidikan Dapat Mendorong Pembangunan Yang Berkelanjutan

A. Integrasi Ekonomi Hijau Dan Kurikulum Pendidikan Dari Sudut Pandang Teori Kurikulum Pendidikan

Integrasi antara ekonomi hijau dan kurikulum pendidikan dapat menjadi langkah yang penting dalam mempersiapkan generasi mendatang untuk memahami dan menghadapi tantangan pembangunan berkelanjutan. Dalam teori kurikulum pendidikan, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk menjelaskan konsep integrasi ini:

1. Pendekatan Interdisipliner: Salah satu pendekatan yang mungkin adalah melalui pendekatan interdisipliner. Kurikulum pendidikan dapat dirancang untuk mengintegrasikan konsep-konsep ekonomi hijau ke dalam berbagai mata pelajaran, seperti ilmu lingkungan, ilmu ekonomi, ilmu sosial, dan lain-lain. Dengan demikian, siswa akan mendapatkan pemahaman yang holistik tentang bagaimana praktik ekonomi dapat berdampak pada lingkungan dan bagaimana praktik ekonomi yang berkelanjutan dapat membantu memperbaiki masalah lingkungan.
2. Pendekatan Kontekstual: Kurikulum pendidikan juga dapat memasukkan pendekatan kontekstual yang memungkinkan siswa untuk belajar tentang ekonomi hijau dalam konteks yang relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari.
3. Misalnya, siswa dapat mempelajari tentang praktik ekonomi hijau dalam konteks bisnis lokal atau dalam konteks kebijakan lingkungan di negara mereka.
4. Pendekatan Kritis: Kurikulum pendidikan juga harus mendorong siswa untuk mengembangkan pemikiran kritis tentang konsep ekonomi hijau. Ini dapat dilakukan dengan memberikan siswa kesempatan untuk menganalisis dan mengevaluasi berbagai pendekatan ekonomi hijau yang ada.

5. Pendekatan Berbasis Proyek: Pendekatan berbasis proyek dapat digunakan untuk mengintegrasikan ekonomi hijau ke dalam kurikulum pendidikan dengan memberikan siswa proyek-proyek yang menuntut mereka untuk merancang solusi-solusi inovatif untuk masalah-masalah lingkungan yang kompleks. Ini tidak hanya membantu siswa memahami konsep-konsep ekonomi hijau secara praktis, tetapi juga mengembangkan keterampilan pemecahan masalah dan kerja tim.
6. Pendekatan Kolaboratif: Terakhir, pendekatan kolaboratif antara lembaga pendidikan, pemerintah, bisnis, dan masyarakat sipil dapat digunakan untuk memastikan bahwa kurikulum pendidikan mencerminkan kebutuhan dan harapan dari berbagai pemangku kepentingan dalam membangun ekonomi hijau. Ini juga dapat membantu memastikan bahwa siswa mendapatkan pengalaman langsung dengan praktik ekonomi hijau melalui magang, kunjungan lapangan, atau proyek kolaboratif dengan perusahaan-perusahaan yang berfokus pada inovasi hijau.

B. Integrasi Ekonomi Hijau dan kurikulum Pendidikan menurut Teori Pengembangan Kurikulum Terintegrasi

Kurikulum terintegrasi merupakan pendekatan yang menggabungkan berbagai mata pelajaran atau disiplin ilmu dalam satu rangkaian pembelajaran. Menurut Khalid Rahman dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kurikulum terintegrasi melibatkan konsepsi terpadu dari visi dan misi, integrasi institusi, integrasi kurikulum, dan pembelajaran melalui model yang sesuai dengan disiplin tunggal, lintas disiplin, serta menggunakan model rasional-interaksi dan model rasional deduktif untuk membagi peran antara kepala sekolah dan guru. Proses pembelajaran di kelas lebih menekankan metode pemecahan masalah, proyek, unit pengajaran, penyelidikan, pendekatan tematik, media pembelajaran, dan sumber pembelajaran. Guru menilai siswa berdasarkan tiga domain: kognitif, afektif, dan psikomotorik⁸².

⁸²<https://media.neliti.com/media/publications/321436-pengembangan-kurikulum-terintegrasi-di-s->

Kemudian Menurut David Ausubel, kurikulum adalah rencana yang mengatur bagaimana informasi baru diintegrasikan dengan pengetahuan yang telah dimiliki oleh siswa. Dalam pendekatan terintegrasi, perhatian diberikan pada struktur pengetahuan siswa dan memfasilitasi proses pembelajaran yang bermakna⁸³. Sehingga dapat dikatakan bahwa integrasi kurikulum membuka peluang bagi peserta didik untuk memahami berbagai permasalahan di lingkungan mereka dengan berbagai pandangan. Peserta didik diharapkan memiliki kompetensi dalam mengidentifikasi, menilai, dan memanfaatkan informasi yang ada di sekitar mereka secara bermakna⁸⁴. Dalam konteks Teori Pengembangan Kurikulum Terintegrasi, integrasi antara ekonomi hijau dan kurikulum pendidikan dapat dipandang sebagai upaya untuk menyatukan berbagai aspek pembelajaran ke dalam satu kurikulum yang koheren dan berkelanjutan. Berikut adalah cara integrasi ini mungkin dijelaskan dalam kerangka teori pengembangan kurikulum terintegrasi:

1. Keterpaduan Tematik: Integrasi ekonomi hijau ke dalam kurikulum pendidikan dapat dilakukan dengan membangun tema atau topik yang melintasi berbagai mata pelajaran. Misalnya, konsep-konsep seperti keberlanjutan, daur ulang, dan energi terbarukan dapat dipelajari melalui mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, matematika, bahasa, dan lain-lain.
2. Pembelajaran Berbasis Proyek: Pendekatan pembelajaran berbasis proyek dapat digunakan untuk mengintegrasikan ekonomi hijau ke dalam kurikulum pendidikan.
3. Pemikiran Sistemik: Integrasi ekonomi hijau juga dapat mendorong pemikiran sistemik di antara siswa, di mana mereka belajar untuk memahami hubungan kompleks antara ekonomi, lingkungan, dan masyarakat.

Kurikulum pendidikan dapat merancang pengalaman belajar yang memungkinkan siswa untuk memahami implikasi jangka panjang dari keputusan ekonomi terhadap lingkungan dan masyarakat.

4. Kerja Sama Antar-disiplin: Integrasi ekonomi hijau dapat mengharuskan kolaborasi antara berbagai disiplin ilmu. Misalnya, ahli ekonomi, ilmuwan lingkungan, dan ahli teknologi dapat bekerja sama untuk mengembangkan kurikulum yang mencakup berbagai aspek pembangunan berkelanjutan.
5. Partisipasi Komunitas: Teori pengembangan kurikulum terintegrasi juga menekankan pentingnya melibatkan komunitas dalam proses pembelajaran. Integrasi ekonomi hijau dapat melibatkan kerjasama dengan pemerintah, bisnis lokal, dan organisasi lingkungan untuk memberikan pengalaman belajar yang relevan dan bermakna bagi siswa.

Melalui pendekatan ini, integrasi antara ekonomi hijau dan kurikulum pendidikan dapat menjadi lebih efektif dan relevan bagi siswa, membantu mereka memahami peran mereka dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan.

C. Integrasi Ekonomi Hijau Dalam Dokumen Kurikulum

Dalam perspektif pedagogis kurikulum menjadi semacam “konstitusi” proses belajar mengajar. Hal ini tergambarkan dalam ketentuan Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai berikut : Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Mengingat pentingnya posisi kurikulum sebagai titik awal dari kegiatan belajar mengajar, urgensi yang perlu mendapat perhatian dari kurikulum adalah pada misi, tujuan dan isi dari setiap mata pelajaran yang diintegrasikan kedalam suatu dokumen yang disebut kurikulum. Oleh karena itu misi kurikulum berkaitan dengan target sistem pendidikan.

Dengan demikian secara agregat isi dari kurikulum merupakan strategi untuk mencapai misi kurikulum. Pada tataran misi dan tujuan, kurikulum memuat suatu arah makro tentang tujuan pendidikan . Oleh karena itu perumusan tentang misi dan isi kurikulum tidak secara teknis berkaitan dengan mata pelajaran, tetapi mempunyai kontekstual lingkungan kebijakan.

Louisa May Alcot (832-88) kurikulum tidak secara spesifik merujuk kepada mata pelajaran. Kurikulum tidak steril dari kejadian yang terjadi diluar ranah pendidikan. Kondisi politik, sosial, dan perkembangan pergaulan internasional menjadi pertimbangan dalam penentuan misi dan isi kurikulum. Disatu pihak, hal ini menjadikan penetapan misi dan isi kurikulum menjadi complicated, dilain pihak hal ini merupakan keharusan karena pendidikan mengantarkan manusia untuk tidak berpola pikir yang sempit. Manusia berpendidikan memiliki kemampuan berpikir analitik terhadap lingkungan sekitar. Dengan kemampuan analitik pemahaman mengapa suatu kejadian dapat terjadi, bagaimana kejadiannya, dan konteks apa kejadian tersebut terjadi memberikan suatu wawasan kepada manusia terpelajar untuk beradaptasi dengan lingkungannya.

Terkait dengan integrasi ekonomi hijau dan kurikulum pendidikan ini menjadi bagian atau salah satu bentuk upaya mendorong isu lingkungan dan keberlanjutan pembangunan dalam dunia pendidikan. Untuk itu dalam menyiapkan dokumen kurikulum, setiap satuan pendidikan perlu menyusun perencanaan dan pengembangan kurikulum melalui tahapan sebagai berikut:

- Membangun komitmen seluruh komunitas dunia pendidikan dan masyarakat sekitar untuk melaksanakan pendidikan berbasis kurikulum ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan
- Melakukan analisis konteks untuk menetapkan sumber daya dan sarana yang diperlukan, nilai-nilai dan indikator yang dikembangkan, serta prosedur penilaian keberhasilan.

- Merumuskan visi, misi, dan tujuan dalam menuju lingkungan pendidikan yang berbudaya peduli lingkungan dan memahami konsep penerapan ekonomi hijau.

D. Kurikulum Pendidikan Dapat Mendorong Pembangunan Berkelanjutan

Sistem pendidikan nasional merupakan keseluruhan system yang terpadu dari semua satuan dan aktivitas pendidikan yang berkaitan antara satu dengan lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan Pendidikan nasional. Menurut DR. lin Kandedes, S.Hum, MA. dalam buku Kebijakan Pendidikan di Propinsi DKI Jakarta (Studi Perbandingan terhadap Madrasah dan Sekolah). Menjelaskan bahwa sistem Pendidikan nasional dibangun dengan berpedoman pada UU Sistem Pendidikan nasional (Sisdiknas) No.20 tahun 2003⁸⁵. Dalam UU Sisdiknas peran kurikulum memiliki posisi yang penting dan krusial. UU Sisdiknas menetapkan standar nasional pendidikan termasuk standar isi kurikulum. Hal ini mencakup materi pembelajaran yang harus diajarkan di setiap jenjang pendidikan mulai dari pendidikan dasar hingga tinggi. UU Sisdiknas juga memberikan landasan untuk pengembangan kurikulum yang berkelanjutan dan relevan dengan kebutuhan zaman. Kurikulum dikembangkan untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat.

Kurikulum pendidikan memainkan peran penting dalam mendorong pembangunan berkelanjutan. Dan Upaya ini dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan sebagai berikut:

1. Menanamkan kesadaran dan nilai-nilai:

- Kurikulum dapat menanamkan kesadaran tentang pentingnya pembangunan berkelanjutan sejak usia dini melalui pendidikan lingkungan, pendidikan moral, dan pendidikan kewarganegaraan.

⁸⁵ lin Kandedes.(2018). Kebijakan Pendidikan Di Propinsi DKI Jakarta (Studi Perbandingan terhadap Madrasah dan Sekolah)

- Hal ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam semua mata pelajaran, seperti matematika, sains, dan bahasa.
- Contohnya, guru dapat mengajarkan siswa tentang dampak perubahan iklim, pentingnya konservasi sumber daya alam, dan bagaimana membuat pilihan yang ramah lingkungan.

2. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan:

- Kurikulum dapat membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.
- Ini termasuk keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, komunikasi, dan kolaborasi. Siswa juga dapat belajar tentang teknologi hijau, praktik pertanian berkelanjutan, dan bagaimana memulai bisnis yang berkelanjutan.
- Contohnya, siswa dapat mengerjakan proyek penelitian tentang masalah lingkungan lokal, merancang kampanye kesadaran tentang isu keberlanjutan, atau memulai taman komunitas.

3. Mendorong partisipasi dan aksi:

- Kurikulum dapat mendorong siswa untuk terlibat dalam kegiatan yang mempromosikan pembangunan berkelanjutan di sekolah, komunitas, dan masyarakat yang lebih luas.
- Ini dapat dilakukan dengan menyediakan peluang bagi siswa untuk belajar melalui pengalaman, seperti layanan masyarakat, magang, dan partisipasi dalam proyek lingkungan.
- Contohnya, siswa dapat menjadi sukarelawan di taman nasional, membersihkan pantai, atau mengorganisir acara penggalangan dana untuk organisasi lingkungan.

4. Mempersiapkan siswa untuk masa depan:

- Dunia sedang berubah dengan cepat, dan penting untuk mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan dan peluang yang akan datang.

- Kurikulum yang berkelanjutan dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang mereka butuhkan untuk menjadi pemimpin masa depan yang berkelanjutan.
- Siswa dapat belajar tentang ekonomi hijau, tata kelola yang baik, dan keadilan sosial.
- Contohnya, siswa dapat belajar tentang cara merancang kota yang berkelanjutan, mengembangkan kebijakan lingkungan yang efektif, atau mempromosikan hak asasi manusia.

Kurikulum pendidikan dapat memainkan peran penting dalam mendorong pembangunan berkelanjutan. UNESCO dalam publikasinya "Education for Sustainable Development Goals: Guidance for Implementation"⁸⁶, UNESCO menyatakan bahwa pendidikan adalah kunci untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Kurikulum yang berkelanjutan dapat membantu siswa mengembangkan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang mereka butuhkan untuk berkontribusi pada masa depan yang lebih berkelanjutan.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia: Dalam dokumen "Panduan Pengembangan Kurikulum 2013", Kemendikbudristek menyatakan bahwa Kurikulum 2013 dirancang untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang mereka butuhkan untuk menjadi agen perubahan yang positif dan berkelanjutan. Kurikulum ini menekankan pada pengembangan karakter, literasi, dan keterampilan berpikir kritis, yang semuanya penting untuk pembangunan berkelanjutan.

5. Literasi Ekonomi Hijau di Indonesia:

Indeks Ekonomi Hijau (GEI): Pada tahun 2022, Indonesia meluncurkan Indeks Ekonomi Hijau (GEI) untuk mengukur transformasi pembangunan berkelanjutan. GEI terdiri dari 15 indikator yang mencakup tiga pilar: ekonomi, sosial, dan lingkungan.

⁸⁶ : <https://www.unesco.org/en/education-sustainable-development>

Pilar ekonomi melibatkan indikator seperti intensitas emisi, intensitas energi, dan pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita⁸⁷. Manfaat Transisi ke Ekonomi Hijau: Upaya transisi menuju Ekonomi Hijau dapat memberikan beragam manfaat bagi Indonesia. Beberapa di antaranya adalah pertumbuhan PDB rata-rata di angka 6,1-6,5 persen per tahun hingga 2050, penyelamatan 87-96 miliar ton emisi Gas Rumah Kaca pada rentang 2021-2060, serta penurunan intensitas emisi sebesar 68 persen pada tahun 2045. Selain itu, Pendapatan Nasional Bruto (PNB) juga diperkirakan lebih tinggi di rentang 25-34 persen, setara dengan USD 13.890-14.975 per kapita pada tahun 2045⁸⁸. Literasi Digital Ekonomi Hijau: Literasi digital ekonomi hijau merupakan kemampuan individu atau kelompok untuk memanfaatkan teknologi digital dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan⁸⁹.

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2019 menunjukkan indeks literasi keuangan sebesar 38,03% dan indeks inklusi keuangan sebesar 76,19%⁹⁰. Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi hijau, dan literasi serta pemahaman mengenai konsep ini menjadi kunci dalam mewujudkannya. The Association for Environmental Education (AEE): Dalam publikasinya "The National Environmental Education Standards⁹¹". AEE menyatakan bahwa standar pendidikan lingkungan harus dirancang untuk membantu siswa memahami dan mengatasi masalah lingkungan. Kurikulum yang berkelanjutan harus mengintegrasikan pendidikan lingkungan ke dalam semua mata pelajaran dan menyediakan peluang bagi siswa untuk belajar melalui pengalaman.

⁸⁷<http://greengrowth.bappenas.go.id/indonesia-luncurkan-indeks-ekonomi-hijau-untuk-mengukur-transformasi-pembangunan-berkelanjutan/>

⁸⁸<https://koran.tempo.co/read/info-tempo/478439/transisi-ekonomi-untuk-pembangunan-berkelanjutan>

⁸⁹ <https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jipp/article/download/6922/2773>

⁹⁰<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Kuangan-Indonesia-2021-2025.aspx>

⁹¹ <https://eepro.naaee.org/resource/k-12-environmental-education-guidelines-excellence>,

18. Strategi Integrasi Ekonomi Hijau Dan Kurikulum Pendidikan Guna Mendorong Pembangunan Berkelanjutan

Berdasarkan analisa dan pembahasan pada hasil analisa SWOT, PETSEL dan Analisa Dynamic Governance yang sudah dilakukan sebelumnya terkait integrasi ekonomi hijau dan kurikulum pendidikan hasil-hasil analisa ini dapat membantu mengidentifikasi dan merumuskan strategi integrasi ekonomi hijau dan kurikulum pendidikan guna mendorong pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, perumusan strategi pada kajian ini didasari juga pada kerangka berpikir sesuai dengan Teori kurikulum Pendidikan, Teori integrasi kurikulum. Sedangkan proses perumusan strateginya berdasarkan pada Teori Strategi sesuai dengan pendapat Alfred Chandler dan Anthony dan Govindarajan, dimana kedua pendapat tersebut sejalan dengan definisi Kontemporer Strategi, yaitu sebuah ilmu yang didasari oleh komponen tujuan (*Ends*), cara (*Ways*), dan sarana (*Means*) yang dilaksanakan dalam suatu rentang waktu (*Timeline*), distribusi tugas (*Tasking*), dan pengukuran keberhasilan (*Metrics*). Berikut adalah strategi Integrasi ekonomi hijau dan kurikulum pendidikan guna mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

Integrasi ekonomi hijau dan kurikulum pendidikan merupakan proses yang kompleks dan berkelanjutan. Namun, dengan strategi yang tepat, hal ini dapat menjadi alat yang efektif untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua. Strategi integrasi ekonomi hijau dan kurikulum pendidikan adalah langkah penting dalam mendorong pembangunan berkelanjutan.

Berikut beberapa strategi yang dapat diterapkan:

1. Mengintegrasikan Konsep Ekonomi Hijau ke dalam Kurikulum

- **Pendidikan dasar:** Mengajarkan siswa tentang pentingnya kelestarian lingkungan, perubahan iklim, dan ekonomi hijau sejak usia dini. Hal ini dapat dilakukan melalui mata pelajaran seperti sains, sosial, dan seni.

- **Pendidikan menengah:** Memberikan siswa pengetahuan yang lebih mendalam tentang ekonomi hijau, termasuk prinsip-prinsipnya, praktik terbaik, dan peluang karir. Mata pelajaran seperti ekonomi, bisnis, dan teknologi dapat dimanfaatkan untuk tujuan ini.
- **Pendidikan tinggi:** Menawarkan program studi yang berfokus pada ekonomi hijau, seperti ilmu lingkungan, energi terbarukan, dan agrikultur berkelanjutan. Program-program ini dapat membantu menghasilkan tenaga profesional yang siap untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

2. Mendorong Pembelajaran Berbasis Pengalaman

- **Kegiatan praktik:** Memberikan siswa kesempatan untuk belajar tentang ekonomi hijau melalui kegiatan praktik, seperti menanam pohon, membersihkan sungai, atau mengunjungi proyek energi terbarukan.
- **Studi kasus:** Menggunakan studi kasus untuk menunjukkan bagaimana ekonomi hijau dapat diterapkan di dunia nyata.
- **Proyek kewirausahaan:** Mendorong siswa untuk mengembangkan proyek kewirausahaan yang berfokus pada ekonomi hijau.

3. Meningkatkan Kapasitas Guru

- **Pelatihan:** Memberikan pelatihan kepada guru tentang ekonomi hijau dan bagaimana mengintegrasikan konsep-konsepnya ke dalam kurikulum.
- **Sumber daya:** Menyediakan guru dengan sumber daya yang dapat digunakan untuk mengajar tentang ekonomi hijau, seperti buku teks, video, dan situs web.
- **Jaringan:** Membangun jaringan guru yang dapat saling berbagi ide dan pengalaman tentang integrasi ekonomi hijau ke dalam kurikulum.

4. Melibatkan Pemangku Kepentingan

- **Pemerintah:** Bekerja sama dengan pemerintah untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung integrasi ekonomi hijau ke dalam kurikulum.
- **Bisnis:** Bermitra dengan bisnis untuk menyediakan peluang bagi siswa untuk belajar tentang ekonomi hijau melalui magang dan proyek lainnya.

- **Masyarakat sipil:** Bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil untuk meningkatkan kesadaran tentang ekonomi hijau dan mendorong partisipasi publik dalam pembangunan berkelanjutan.

5. Memanfaatkan Teknologi

- **Teknologi informasi dan komunikasi:** Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyediakan siswa dengan akses ke sumber daya tentang ekonomi hijau.
- **Simulasi:** Menggunakan simulasi untuk membantu siswa memahami dampak ekonomi hijau.
- **Media sosial:** Menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang ekonomi hijau dan mendorong partisipasi publik.

6. Penyelarasan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Kurikulum pendidikan perlu disusun sedemikian rupa sehingga mencerminkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang dijelaskan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Mata pelajaran yang berkaitan dengan ekonomi hijau, seperti ilmu lingkungan, kewirausahaan berkelanjutan, dan manajemen sumber daya alam, dapat diperkuat dan diintegrasikan secara eksplisit.

7. Pendidikan Lingkungan yang Terintegrasi: Mata pelajaran tentang lingkungan hidup dan keberlanjutan dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum pada berbagai tingkatan, dari pendidikan dasar hingga tinggi. Ini dapat membantu siswa memahami pentingnya menjaga alam dan lingkungan.

8. Pendidikan Keterampilan Berkelanjutan: Kurikulum pendidikan dapat menekankan pengembangan keterampilan berkelanjutan seperti keterampilan teknologi hijau, kewirausahaan berkelanjutan, dan manajemen sumber daya alam. Ini akan mempersiapkan siswa untuk terlibat dalam ekonomi hijau dan mengambil peran aktif dalam pembangunan berkelanjutan di masa depan.

9. Pendekatan Interdisipliner: Pendekatan interdisipliner dalam kurikulum dapat membantu siswa memahami hubungan yang kompleks antara aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam pembangunan berkelanjutan. Ini dapat menciptakan pemahaman yang lebih menyeluruh dan mendorong siswa untuk mengambil tindakan yang terintegrasi dalam mendukung pembangunan

BAB. IV

PENUTUP

19. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, telah ditemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kajian sebagai berikut:

a. Pelaksanaan materi kuliah tentang ekonomi hijau pada kurikulum pendidikan di perguruan tinggi saat ini adalah :

- 1) Pelaksanaan materi kuliah tentang ekonomi hijau saat ini sudah banyak dilakukan, baik di UIN Jakarta maupun di perguruan tinggi lainnya di Indonesia meskipun materinya tidak seragam karena belum adanya kurikulum standar. Dalam prakteknya UIN Jakarta sudah mulai mengintegrasikan materi tentang ekonomi hijau ke dalam kurikulum sebagai respons terhadap meningkatnya kesadaran akan pentingnya keberlanjutan lingkungan dan perlunya mengadopsi praktik ekonomi yang ramah lingkungan.
- 2) Saat ini selain di UIN Jakarta menurut data ringkasan eksekutif buku kajian Pembelajaran Ekonomi Hijau di Indonesia yang diterbitkan oleh Partnership for Action on Green Economy (PAGE) ditemukan ada 100 program studi di perguruan tinggi dan lembaga pelatihan di Indonesia secara aktif terlibat dalam isu lingkungan dan perubahan iklim. Sekitar seperempat dari program studi ini melaksanakan kegiatan pembelajaran terkait ekonomi hijau.
- 3) Pelaksanaan materi tentang ekonomi hijau dalam kurikulum perguruan tinggi dan pendekatan pengajarannya saat bervariasi tidak mengacu pada satu kurikulum pengajaran yang sama, tergantung pada bidang studi tertentu dan prioritas institusi masing-masing. Beberapa perguruan tinggi mungkin menawarkan mata kuliah khusus tentang ekonomi hijau atau pembangunan berkelanjutan, sementara yang lain mengintegrasikan konsep-konsep tersebut ke dalam mata kuliah yang sudah ada seperti ekonomi makro, mikro, manajemen lingkungan, atau teknologi ramah lingkungan.

- b. Kurikulum pendidikan dapat mendorong pembangunan yang berkelanjutan:
- 1) Menanamkan kesadaran dan nilai-nilai tentang pentingnya pembangunan berkelanjutan sejak usia dini hingga perguruan tinggi melalui pendidikan lingkungan, pendidikan moral, dan pendidikan kewarganegaraan dibutuhkan kurikulum yang komprehensif dan terintegrasi
 - 2) Kurikulum adalah instrumen untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Kurikulum juga mendorong partisipasi dan aksi. Kurikulum dapat mendorong mahasiswa dan lingkungan perguruan tinggi untuk terlibat dalam kegiatan yang mempromosikan pembangunan berkelanjutan di lingkungan kampus, komunitas, dan masyarakat yang lebih luas.
- c. Strategi integrasi ekonomi hijau dan kurikulum pendidikan guna mendorong pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan cara:
- 1) Mengintegrasikan Konsep Ekonomi Hijau ke dalam Kurikulum pendidikan. mendorong pembelajaran berbasis pengalaman, meningkatkan kapasitas guru, melibatkan pemangku kepentingan, memanfaatkan teknologi, penyelarasan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.
 - 2) Melakukan pendekatan pendidikan lingkungan yang terintegrasi, pendidikan keterampilan berkelanjutan, pendekatan interdisipliner, kemitraan antara pemerintah, industri, dan perguruan tinggi, pengembangan program studi dan mata kuliah khusus, serta penekanan pada literasi ekonomi hijau.

20. Rekomendasi

- 1) Kemendikbudristek dan DPR RI mendorong revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional agar ada ruang bagi sektor industri dan praktisi ekonomi hijau dapat masuk terlibat dalam dalam pengembangan kurikulum dan materi ajar. Ini dapat membantu memastikan bahwa kurikulum mencerminkan kebutuhan aktual pasar kerja dan menggambarkan aplikasi praktis dari konsep-konsep ekonomi hijau dalam konteks nyata.

- 2) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset RI dan Teknologi serta Kementerian Agama RI membuat program untuk menghadirkan kurikulum pendidikan yang terintegrasi dengan konsep ekonomi hijau. Agar perguruan Tinggi dapat mengintegrasikan konsep-konsep ekonomi hijau secara lebih mendalam dalam kurikulum pendidikan formal, meliputi penyusunan modul, materi pembelajaran, dan kegiatan ekstrakurikuler yang fokus pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
- 3) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset RI dan Teknologi serta Kementerian Agama RI membuat program pelatihan dan pengembangan profesional kepada para dosen dan tenaga pengajar lainnya agar mereka dapat mengajar dan mengintegrasikan konsep ekonomi hijau dengan efektif. Para dosen dan Guru perlu dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menyampaikan materi pembelajaran.
- 4) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset RI dan Teknologi serta Kementerian Agama RI agar melakukan pengembangan materi pembelajaran yang inovatif, termasuk teknologi digital dan simulasi, untuk membantu siswa dan mahasiswa memahami dampak dari keputusan ekonomi terhadap lingkungan dan cara-cara untuk mengurangi dampak tersebut.
- 5) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI, Kementerian Agama RI dan Kementerian Lingkungan Hidup dapat melaksanakan kolaborasi dalam pengembangan kurikulum dan penelitian terkait integrasi ekonomi hijau kedalam kurikulum perguruan tinggi antar disiplin ilmu, termasuk ekonomi, ilmu lingkungan, dan pendidikan.

Jakarta, 19 Agustus 2024



Dr. Iin Kandedes, M.A
Peserta PPRA LXVI
NIP. 197912022011012006

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Dadang Solihin. Radjab Semendawai.(2013).Optimalisasi Otonomi Daerah. Kebijakan Strategi Dan Upaya. Yayasan Empat Sembilan
- Dadang Solihin. Antoni Lutfi Arifin.(2024).Navigasi Kepemimpinan Menuju Indonesia Emas 2045. Penerbit IPB Press
- Dede Rosyada (2004).Paradigma Pendidikan Demokratis, Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan. Prenada Media.
- Diding Nurdin. Imam Sibaweh.(2015).Pengelolaan Pendidikan.Dari Teori Menuju Implementasi. Penerbit PT Radja Gravindo Perkasa.
- Eveline Siregar. Hartini Nara.(2010).Teori Belajar Dan Pembelajaran.Penerbit Ghalia Indonesia.
- Global Green Growth Institute.(2015).Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau. Untuk Indonesia Yang Sejahtera. Sebuah Peta Jalan Untuk kebijakan.Perencanaan dan Investasi.
- H. Syafruddin Nurdin. (2016).Kurikulum Dan Pembelajaran. PT. Raja Gravindo Persada.
- lin Kandedes. (2018).Kebijakan Pendidikan Di Propinsi DKI Jakarta. Penerbit Nusa Litera Inspirasi.
- I Gusti Ngurah Alit Wiswasta. I Gusti Ayu Ari Agung. I Made Tamba. (2018). Analisa SWOT (Kajian Perencanaan Model, Strategi, Dan Pengembangan usaha). Universitas Mahasaraswati Press.
- Nanang Fattah.(2014).Analisa Kebijakan Pendidikan. Penerbit PT Remaja Rosdakarya.Bandung.
- Nana Saodih Sukmadinata.(2007). Pengembanagan Kurikulum, Teori Dan Praktik. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurlita Pertiwi.(2017). Implementasi Sustainable Development di Indoensia. Pustaka Ramadan.
- Patnership For Action on Green Economy.(2021).Kajian Pembelajaran ekonomi Hijau Di Indonesia.
- Sari Seftiani. (2023).Praktik Ekonomi Hijau Di Indonesia. Yayasan Pustaka Obor Indoensia.

Tim Pengembang MKDP. (2011). Kurikulum & Pembelajaran. PT Raja Grafindo Persada.

Waryani Fajar Riyanto. (2013). Integrasi-Interkoneksi Keilmuan: Biografi Intelektual M. Amin Abdullah (Yogyakarta: Suka Press).

Zahari MS. Sudirman. (2017). Green Ekonomi. Tangga Ilmu, Yogyakarta. ISBN 978-602-98052-9-1

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

UU No. 32 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

UU No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas konvensi kerangka kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan iklim)

UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2014 tentang Pengesahan *Agreement on the Establishment of the Global Green Growth Institute*.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum

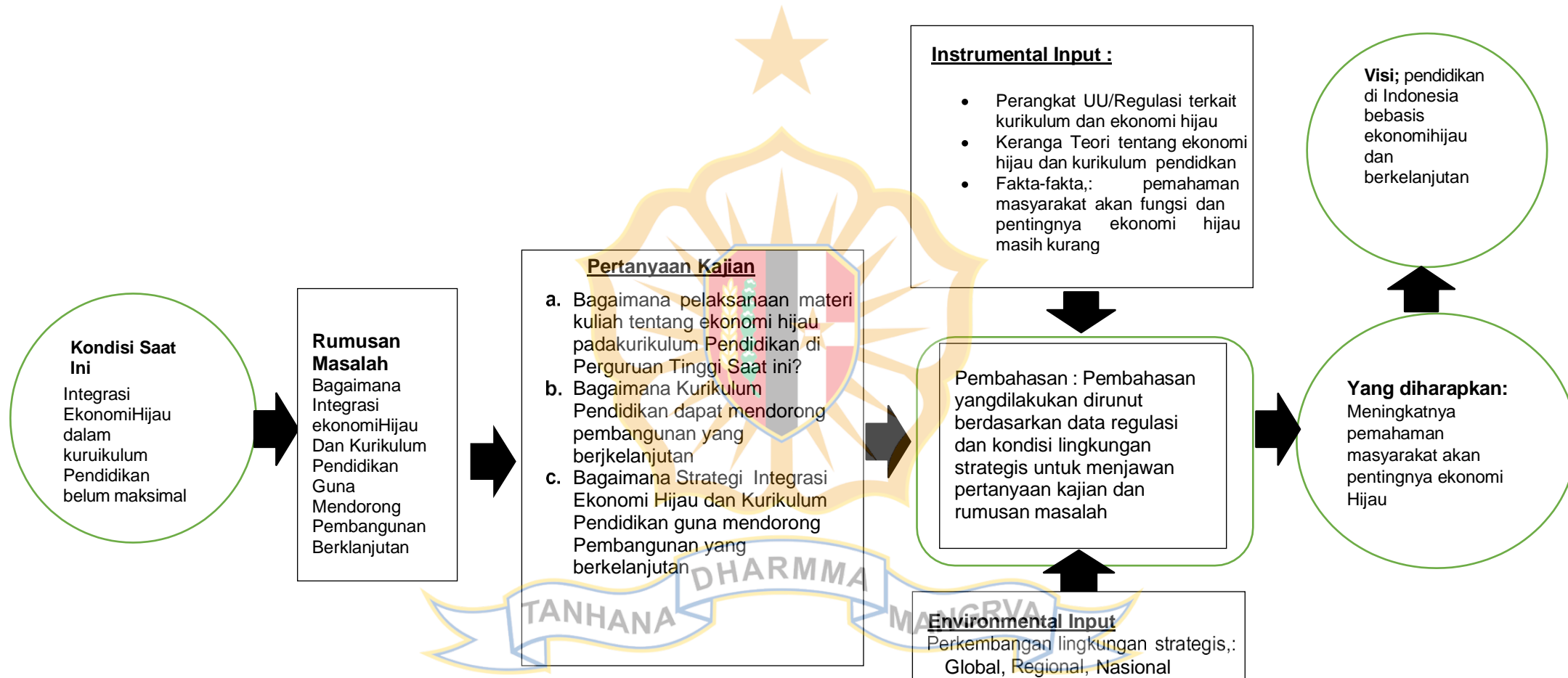
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111. Tahun 2022, tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

SUMBER INTERNET

- Agung Jatmiko, Risma Khollik.(2023).Ekonomi Hijau, Defenisi, Karakteristik, Dan UrgensiPenerapannya.<https://katadata.co.id/ekonopedia/istilah-ekonomi/6581c29a31500/ekonomi-hijau-definisi-karakteristik-dan-urgensi-penerapannya>.Diakses pada tanggal 25 mei 2024, pukul 02.32 Wib.
- Anwar Muhammad Fondation.(2021). Ekonomi Hijau Dan Peran Dalam Mewujudkannya.<https://amf.or.id/ekonomi-hijau-dan-peran-perguruan-tinggi-dalam-mewujudkannya/>. Diakses pada tanggal 10 mei 2024, pukul 12.00 Wib
- Asrori.(2021).Pengembangan Integrasi Kurikulum.[https://www.academia.edu/50048355/Pengembangan Integrasi Kurikulum](https://www.academia.edu/50048355/Pengembangan_Integrasi_Kurikulum) . Diakses pada tanggal 13 april 2024 Wib.
- Mekari Jurnal.(2023). Analisis Bisnis Model PESTEL, Kenali Beberapa Faktor ini.<https://www.jurnal.id/id/blog/model-bisnis-pestel/>. Di akses pada tanggal 25 mei, pukul 02.45 Wib
- Rheza Adi Prihardani.(2022).Pengertian Pembangunan Berkelanjutan, 4 ciri, dan contohnya.<https://dosengeografi.com/pembangunan-berkelanjutan/> diakses pada tanggal 25 mei 2024 pukul 02,35 Wib.
- Adi Ahdiat.(2022).Pelestarian Lingkungan Indonesia Tergolong Buruk di Asia Pasifik, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/25/>, diakses pada tanggal 11 Mei 2023, pukul 02.32 Wib.
- Linda Widowati. Kristina Setyowati.Didik Gunawan.S.(2023) .Dynamic Governance As Prespective in Indonesia Bureaucracy Reform. <http://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jbp/article/view/1800>. Di akses pada tanggal 26 Mei, pukul 08.30 Wib.
- Rosyda.(2021). Pengertian ekonomi Hijau:Awal mula, tujuan, Prinsip, Dan Macamnya. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-ekonomi-hijau/>. Diakses pada tanggal 12 april 2024, pukul 10.30 Wib.
- Wikipedia.(2024).PembangunanBerkelanjutan.[https://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan berkelanjutan](https://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_berkelanjutan). Diakses pada tanggal 2 april 2024, pukul 10.12. Wib.

Integrasi Ekonomi Hijau Dan Kurikulum Pendidikan Guna Mendorong Pembangunan Berkelanjutan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Dr. lin Kandedes, MA. lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Desember 1979 dan memiliki suami bernama Ir. Jailani, ST, serta tiga orang anak, yaitu: Raisah Elvina Shafa, Adryanta Rais El Azzam, dan Safira Rafania El Noura.

Putri dari Alm. Bapak Drs M. Sobri Gani, GM dan Ibunda Dr. Rumadani Sagala, M.Ag ini lulus dari Pondok Pesantren Daar El Qolam Banten. Penulis melanjutkan pendidikan S1 Pada jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatulah Jakarta dan lulus pada tahun 1999. Penulis menyelesaikan studi jenjang S2 Pendidikan Islam dari Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatulah Jakarta pada tahun 2006, dan gelar S-3 Pendidikan Islam dari Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatulah Jakarta yang diselesaikan pada tahun 2018.

Penulis adalah Dosen Pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Syarif Hidayatulah Jakarta. Penulis mengikuti Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVI Lemhannas RI tahun 2024.

Sebagai ASN penulis pernah bertugas di UIN Syarif Hidayatulah Jakarta sebagai Koordinator Pusat Studi Gender dan Anak Periode 2019-2022. Penulis juga seorang aktivis perempuan muslimah dan aktif di banyak Organisasi Kemasyarakatan. Penulis adalah mantan Pengurus KOHATI PB HMI Periode 2003-2005, pernah menjadi Pengurus Bidang Pendidikan, IPTEK dan Seni Budaya KOWANI selama dua periode di tahun 2010-2015 dan 2004-2010.

Saat ini penulis adalah pengurus pada beberapa organisasi dengan berbagai posisi, diantaranya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPP Pengajian Al Hidayah Periode 2020-2025 dan menjabat sebagai Presidium BMIWI (Badan Musyawarah Islam Wanita Indonesia) sebuah organisasi federasi yang menaungi 35 ormas muslimah tingkat pusat.

Penulis memiliki banyak sertifikat dan mengikuti kegiatan pelatihan, salah satu diantaranya Sertifikat Pelatihan Moderasi Beragama dari Kementerian Agama RI tahun 2023.

Diantara penghargaan yang dimiliki Penulis antara lain: tanda jasa Satya Lencana Kesetiaan 10 Tahun sebagai ASN.

Jakarta, 19 Agustus 2024

Penulis

Dr. lin Kandedes, M.A
NIP. 197912022011012006